

PELAYANAN PENDIDIKAN BAGI KOMUNITAS ADAT



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PUSAT PENELITIAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2017

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan

Indonesia. Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Pelayanan Pendidikan Bagi Komunitas Adat

Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Balitbang, Kemendikbud, 2017

V, 83h

ISBN: 978-602-8613-75-0

1. Komunitas Adat
2. Budaya
3. Model Kurikulum
4. Inklusi
5. Suku Badui

I. JUDUL

II. PUSAT PENELITIAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
BALITBANG, KEMDIKBUD

III. SERI PENELITIAN KEBIJAKAN

Tim Penyusun : Mikka Wildha Nurrochsyam, M.Hum.
Drs. Philip Suprastowo, PU
Dra. Ina Trilestari, M.Hum.
Dr. Mursalim, M.Pd., M.Inf.Tech.

Tim Penyunting : Damardjati Kun Marjanto, S.Sos.
Nur Berlian V. Ali, M.SE

PERNYATAAN HAK CIPTA

© Puslitjakdikbud/Copyright@2017

Hak Cipta dilindungi Undang-undang. Diperbolehkan mengutip dengan menyebut sumber.

Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan
Badan Penelitian dan Pengembangan, Kemendikbud Gedung E, Lantai 19
Jalan Jenderal Sudirman-Senayan, Jakarta 10270
Telp. 021-5736365; Faks. 021-5741664
Website: <https://litbang.kemdikbud.go.id>
e-mail: puslitjakbud@kemdikbud.go.id

KATA SAMBUTAN

Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan (Puslitjakkidbud), Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada Tahun 2017 menerbitkan Buku Laporan Hasil Penelitian yang merupakan hasil kegiatan Tahun 2016. Penerbitan Buku Laporan Hasil Penelitian ini dimaksudkan antara lain untuk menyebarluaskan hasil penelitian kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan sebagai wujud akuntabilitas publik Puslitjakkidbud, Balitbang, Kemendikbud, sesuai dengan Renstra Puslitjak Tahun 2016.

Buku Laporan Hasil Penelitian yang diterbitkan tahun ini terkait prioritas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan; Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah, Pendidikan Masyarakat; dan Bidang Kebudayaan.

Kami menyambut gembira atas terbitnya Buku Laporan Hasil Penelitian ini dan mengharapkan informasi hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan rekomendasi bagi para pengambil kebijakan dan referensi bagi pemangku kepentingan lainnya dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan serta mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya penerbitan Buku Laporan Hasil Penelitian ini.

Jakarta, Desember 2017

plt. Kepala Pusat,



Dr. Ir. Bastari, M.A.

NIP 196607301990011001

KATA PENGANTAR

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019, bidang kebudayaan dijabarkan bahwa dalam kerangka strategi Kemdikbud tujuan pembangunan bidang kebudayaan adalah terbentuknya “Insan serta Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter dengan Dilandasi Semangat Gotong-Royong”.

Namun permasalahan yang mendesak perlu dijawab oleh pemerintah dalam kaitannya dengan pelayanan pendidikan bagi komunitas adat terpencil antara lain bagaimanakah pemerintah perlu merumuskan pendidikan yang tepat bagi komunitas adat, karena tanpa itu para guru-guru dan pelaksana pendidikan yang memegang kendali bagi pelayan pendidikan bagi komunitas adat tidak akan dapat melayani pendidikan bagi komunitas adat dengan baik. Kemudian bagaimanakah pemerintah memberikan pelayanan pendidikan yang tepat bagi komunitas adat, karena komunitas adat mempunyai nilai-nilai budaya khas yang tentunya berbeda dengan pelayanan pendidikan yang sifatnya umum.

Oleh karena itu penelitian diharapkan memiliki signifikansi yang tinggi dalam membantu perkembangan literatur pendidikan dan kebudayaan yang berkembang dewasa ini khususnya menutup gap yang ada dengan kurang tersedianya penelitian kebijakan dan pendidikan khusus komunitas adat terpencil.

Jakarta, Desember 2017

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Metode Penelitian	5
1.4.1 Waktu Penelitian	6
1.4.2 Pengumpulan Data	6
1.4.3 Analisis Data	7
1.5. Manfaat Penelitian	7
1.5.1 Manfaat Teoretis	7
1.5.2 Manfaat Kebijakan	8
1.5.3 Manfaat Praktis	8
BAB II PELAYANAN PENDIDIKAN KOMUNITAS ADAT SUKU LAUT	10
2.1 Gambaran Umum Masyarakat Suku Laut	10
2.2 Lokasi dan Geografi	14
2.3 Demografi	15
2.4 Sejarah	16
2.5 Budaya	17
2.2.2 Hambatan Akses Pendidikan	23
2.2.2.1 Kendala Geografis	23
2.2.2.2 Kendala Infrastruktur	24
2.2.2.3 Ketersediaan Sumberdaya	24
2.2.2.3.1 Guru	25
2.2.2.3.2 Relawan	25
2.2.3 Tingkat Perekonomian	26
2.2.4 Kebijakan Pemerintah Daerah	26
2.3 Alternatif Solusi	27
2.4.1 Tujuan	30
2.4.2 Sasaran	31
2.4.3 Target Output/Outcome	32
2.6 PLK Suku Laut	38
2.7 Penyelenggaraan	39
2.8 Model Kurikulum	40
2.8.1 Model Kurikulum Sekolah Formal	41
2.8.2 Program Mendesak	43
2.8.3 Program Pemberantasan Buta Aksara	44
2.8.4 Taman Bacaan Masyarakat	45
2.8.5 Program Pendidikan Kesetaraan	46

BAB III PELAYANAN PENDIDIKAN BAGI KOMUNITAS ADAT SUKU	
BADUY DI LEBAK BANTEN	50
3.1 Kebudayaan Suku Baduy	50
3.2 Pelayanan Pendidikan pada Komunitas Suku Baduy.....	50
3.2.1 Pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF)	51
3.2.2 Pendidikan Kesetaraan	55
3.2.3 Pendidikan Formal (“Persekolahan”)	58
3.3 Hambatan dan Kendala Pelayanan Pendidikan pada Masyarakat Suku Baduy.....	60
3.3.1 Aspek Budaya.....	61
3.3.2 Aspek Geografis	61
3.3.4 Orangtua Tidak Mampu.....	62
3.3.5 Kemampuan Lembaga Pendidikan	62
3.3.6 Kehadiran Warga Belajar	63
3.4 Beberapa Harapan Masyarakat Suku Baduy.....	63
3.5 Model Pelayanan Pendidikan bagi Masyarakat Suku Baduy.....	64
3.5.1 Model Penguatan Internalisasi Budaya Baduy	66
3.5.2 Model Pendidikan Tersembunyi (Diam-diam).....	71
3.5.3 Model Pendidikan Keaksaraan Fungsional	72
3.5.4 Model Pendidikan Kesetaraan	73
3.5.5 Pendidikan “Sekolah” (Formal).....	74
3.5.6. Model Layanan Pendidikan Lainnya	74
3.5.6.1 Pelayanan Pendidikan Inklusi	75
3.5.6.1 Diklat Keterampilan Melalui Kursus	75
BAB IV SIMPULAN DAN REKOMENDASI	76
4.1 Simpulan	76
4.2. Rekomendasi.....	78

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Istilah “komunitas adat” mempunyai beberapa pengertian yang masih dalam perdebatan. Beberapa istilah yang mirip dengan istilah “komunitas adat” antara lain, masyarakat hukum adat; masyarakat adat; dan banyak istilah lain yang menunjukkan sebuah kelompok masyarakat yang perlu mendapat perlakuan khusus dalam pemenuhan hak-hak sipil. Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan disebutkan tentang istilah “masyarakat adat terpencil”. Dalam pengertian ini masyarakat adat dikaitkan dengan pendidikan layanan khusus yang merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi. Istilah masyarakat adat terpencil menggambarkan tentang perlunya pelayanan khusus kepada masyarakat untuk bidang pendidikan karena situasi yang khusus misalnya karena kondisi geografi tertentu.

“Penelitian ini dilaksanakan karena mempunyai beberapa dasar kebijakan: **Pertama** mengacu pada RPJM 2015-2019, bidang kebudayaan yang dijabarkan dalam kerangka strategi Kemdikbud yaitu terbentuknya “Insan serta Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter dengan Dilandasi Semangat Gotong-Royong”. **Kedua**, mengacu pada Nawacita poin 3 dan 5. Nawacita poin 3 menyatakan: “Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa dalam Rangka Negara Kesatuan”. Sedangkan, Nawacita poin 5 menyatakan: “Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Indonesia”. Dalam Nawacita poin 5 ini dijabarkan tentang agenda prioritas program yaitu: “Program Indonesia Pintar melalui Wajib Belajar 12 Tahun tanpa Pungutan”. **Ketiga**, mengacu pada UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 Ayat 3 yang berbunyi “Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus”. **Keempat** mengacu pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, pada Bab I Ketentuan Umum mengatakan bahwa pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan

pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat. **Kelima**, secara langsung masalah pelayanan pendidikan bagi komunitas adat terdapat dalam Permendikbud Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus disebutkan dalam Pasal 6 pada poin (3) disebutkan dalam subpoin b. bahwa PLK memberikan layanan peserta didik di daerah masyarakat adat terpencil.

Penelitian ini menjadi penting karena beberapa alasan. **Pertama, secara yuridis** dapat dijelaskan bahwa pelayanan pendidikan terhadap komunitas adat telah ada dasar hukumnya yang sudah pasti seperti UU Nomor 20 Tahun 2003 dan PP RI Nomor 17 Tahun 2010, serta Permendikbud Nomor 72 Tahun 2013 tetapi terdapat kesenjangan antara peraturan yang telah ada dengan implementasi terhadap peraturan tersebut dalam kaitannya dengan pelayanan pendidikan bagi komunitas adat. Kesenjangan ini dapat dilihat misalnya dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang secara khusus melayani kepentingan komunitas adat dalam pelayanan pendidikan belum ada kelembagaan yang dibentuk secara khusus.

Kedua, secara praktis terdapat praktik-praktik baik dari lembaga-lembaga swadaya masyarakat melakukan upaya-upaya pendampingan untuk melayani pendidikan bagi komunitas adat ini, seperti yang dilakukan diantaranya oleh AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) untuk melayani kepentingan pendidikan bagi komunitas adat namun, pelayanan ini karena atas inisiatif dari lembaga dan masyarakat yang bersangkutan. Praktik-praktik baik yang dilakukan oleh inisiatif dari masyarakat ini perlu disinergikan dengan program pemerintah yang lebih terarah dan memadai.

Kedua, secara kultural, yaitu pelayanan pendidikan terhadap komunitas adat ini menjadi penting karena memberikan masukan terhadap pemerintah dalam upaya pelayanan pendidikan terhadap komunitas adat yang dalam prakteknya seringkali diterapkan terlepas dari *mindset* atau *lifeworld*, pendukung budaya komunitas adat yang bersangkutan. Pelayanan khusus pendidikan bagi komunitas adat dalam pendidikan ini menjadi sangat penting karena, penelitian ini meneliti tentang kaitannya pelayanan pendidikan dengan budaya. Pelayanan pendidikan tidak lagi diorientasikan secara homologis dalam arti standarisasi secara nasional yang diperuntukkan untuk semua masyarakat termasuk bagi komunitas adat. Mengapa? Karena masing-masing budaya itu mempunyai kebenaran dan konteks budaya mereka masing-masing.

Dalam penelitian ini penting untuk mengidentifikasi persoalan-persoalan yang terkait dengan pelayanan pendidikan bagi komunitas adat. Dalam prakteknya pelayanan pendidikan bagi komunitas adat ini belum memadai. Diantaranya, adalah beberapa kasus yang terdapat dalam komunitas tersebut, antara lain: pelayanan pendidikan terhadap keyakinan bagi komunitas adat belum optimal. Bagi komunitas adat tertentu seperti Kaharingan misalnya terdapat tuntutan agar anak-anak penganut Kaharingan diperlakukan untuk mendapat pelajaran sesuai dengan keyakinan yang dianutnya, yaitu agama Kaharingan, bukan agama Hindhu (wawancara dengan Suel, tokoh agama Kaharingan, 2015). Demikian pula masyarakat Samin berharap agar anak-anak mereka mendapat pengajaran pendidikan agama sesuai dengan keyakinan yang mereka yakini yakni agama Adam (wawancara dengan Pramugi, tokoh masyarakat Samin, 2014).

Berdasarkan atas nilai budaya sebuah komunitas adat maka bagi masyarakat Samin pelayanan pemerintah di bidang pendidikan perlu menyesuaikan budaya masyarakat yang bersangkutan. Bidang pertanian menjadi referensi bagi pelayanan masyarakat Samin, sehingga pelayanan pendidikan perlu diorientasikan untuk masyarakat agraris. Karena itu Wajib Belajar 12 Tahun bagi komunitas ini capaiannya perlu mempertimbangkan nilai-nilai budaya masyarakat agraris.

Berbeda dengan masyarakat Bajau, sebagai pendukung budaya masyarakat maritim yang hidupnya sebagian besar menggantungkan pada lingkungan laut, pertanian menjadi asing bagi mereka. Pelayanan pendidikan bagi masyarakat Bajau perlu diorientasikan kepada komunitas Bajau sebagai masyarakat maritim. Beberapa tahun yang lalu di Torosiaje, pemerintah melakukan pemberdayaan masyarakat Bajau di Torosiaje, Gorontalo dengan menempatkan mereka di darat dengan memberikan rumah tinggal dan mengajari hidup sebagai petani dengan menyediakan fasilitas peralatan pertanian dan bibit tanaman. Namun, karena budaya dan karakter khas mereka sebagai masyarakat laut maka tempat tinggal dan fasilitas yang diberikan mereka tinggalkan, dan orang-orang Bajau ini kembali ke laut (observasi di Suku Bajau di Torosiaje, 2008). Melihat dari kasus tersebut maka pelayanan pendidikan terhadap masyarakat Bajau perlu memperhatikan budaya mereka sebagai masyarakat laut.

Bagi masyarakat yang tinggal di hutan misalnya suku Tau Taa Wana hutan adalah tempat tinggal mereka. Lingkungan hutan telah membentuk budaya dan cara hidupnya. Maka, pelayanan pendidikan bagi anak-anak Tau Taa perlu

menyesuaikan dengan nilai-nilai budaya dimana mereka bertempat tinggal. Pendidikan perlu bersifat tematik yaitu sesuai dengan lingkungan mereka tinggal, misalnya bagaimanakah mereka harus melindungi hutan dan menjaga kelestarian alam.

Dalam kaitannya dengan kerangka strategi Kemdikbud penelitian ini diarahkan untuk meneliti tentang pelayanan pendidikan berdasarkan atas kebudayaan yang berkarakter yang menjadi ciri khas masing-masing komunitas adat. Dengan asumsi bahwa masing-masing komunitas adat itu mempunyai kebenaran dan nilai budaya masing-masing yang menjadi karakter masing-masing komunitas adat. Nilai sebuah budaya pada sebuah komunitas kehilangan konteksnya jika diterapkan pada komunitas yang lainnya. Karena itu, pelayanan terhadap komunitas adat perlu mempertimbangkan nilai budaya komunitas adat yang bersangkutan.

Dalam kerangka strategi Kemdikbud penelitian ini menempati posisi pada strategi yang ke 2, yaitu dalam “peningkatan akses dan mutu”. Dalam peningkatan aspek dan mutu penelitian ini melihat mutu pendidikan sesuai lingkup Standar Nasional Pendidikan untuk mengoptimalkan capaian Wajib Belajar 12 Tahun. Dalam komunitas adat tertentu, misalnya bagi masyarakat Samin pendidikan formal tidak menjadi pilihan yang penting, karena beberapa alasan antara lain pendidikan tidak mendukung pekerjaan mereka sebagai petani. Dengan tidak sekolah pun sudah cukup karena keterampilan mengenai masalah pertanian dapat diperoleh dari orang tua mereka dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam rangka rencana strategi Kemdikbud penelitian ini juga diarahkan untuk “meningkatkan ketersediaan serta keterjangkauan layanan pendidikan, khususnya bagi masyarakat yang terpinggirkan”. Menurut Robert Aritonang, Koordinator JaPKA (Jaringan Pendidikan Komunitas Adat), mengatakan bahwa “pendidikan anak-anak komunitas adat selama ini dilalaikan pemerintah, klaim selama ini yang menyebutkan fasilitas SD telah dibangun merata di desa-desa dan gurunya juga merata tak sepenuhnya benar” (Jumal Ahmad, diakses tanggal 19 Maret 2016). Oleh karena itu penelitian ingin mengetahui cara-cara peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan bagi komunitas adat yang terpencil.

Berdasarkan atas uraian di atas maka permasalahan yang mendesak perlu dijawab oleh pemerintah dalam kaitannya dengan pelayanan pendidikan bagi

komunitas adat terpencil yaitu: Bagaimanakah pemerintah perlu merumuskan pendidikan yang tepat bagi komunitas adat, karena tanpa itu para guru-guru dan pelaksana pendidikan yang memegang kendali bagi pelayanan pendidikan bagi komunitas adat tidak akan dapat melayani pendidikan bagi komunitas adat dengan baik.

1.2. Rumusan Masalah

Dalam rangka menemukan model yang tepat untuk peningkatan pelayanan pendidikan bagi komunitas adat maka dalam penelitian ini dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut: Bagaimanakah pemerintah memberikan pelayanan pendidikan yang tepat bagi komunitas adat, karena komunitas adat mempunyai nilai-nilai budaya khas yang tentunya berbeda dengan pelayanan pendidikan yang sifatnya umum.

1.3. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui praktik-praktik pendidikan yang dibutuhkan komunitas adat.
- b. Mengetahui budaya komunitas adat setempat untuk diterapkan dalam program belajar-mengajar di komunitas adat tersebut.
- c. Mengidentifikasi model pendidikan yang sesuai untuk pendidikan di lingkungan komunitas adat.

1.4. Metode Penelitian

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui kajian sekunder terhadap literatur dan hasil-hasil studi yang sudah ada, serta melakukan verifikasi dan pendalaman di dua lokasi yaitu: (1) orang Baduy di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten yang mewakili masyarakat agraris; dan (2) Suku Laut di Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau yang mewakili masyarakat maritim. Subjek penelitian, tokoh adat, dan tokoh masyarakat; guru/tutor yang mengajar anak-anak dari komunitas adat; lembaga swadaya masyarakat; UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan; Dinas Kebudayaan; Budayawan; siswa-siswa SD; aktivitas pendidikan masyarakat adat.

1.4.1 Waktu Penelitian

Pendalaman penelitian di lapangan dalam penelitian ini dilaksanakan di dua tempat, pertama di komunitas adat Suku Baduy, Lebak, Banten dilaksanakan pada tanggal 8–14 Agustus 2016. Kedua, di komunitas Suku Laut, Kepulauan Riau dilaksanakan pada tanggal 12–18 Juni 2016.

1.4.2 Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan *pre-study* dengan mengumpulkan sumber-sumber informasi yang terkait dengan pelayanan pendidikan bagi komunitas adat. *Pre-study* dilakukan dengan mempelajari sumber-sumber tertulis, seperti jurnal ilmiah, buku-buku teks tentang komunitas adat dan sumber informasi dari media *on-line*, tentang praktik-praktik pelayanan pendidikan yang terkait dengan komunitas adat baik yang terdapat di Indonesia maupun di mancanegara. Secara khusus dengan melakukan wawancara mendalam kepada narasumber sebagai *user* penelitian ini antara lain dengan Direktorat Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi; Direktorat Jenderal PAUD dan Pendidikan Masyarakat; Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus; serta kami telah ikut dalam sebuah grup diskusi dengan AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) sehingga sebelum pendalaman ke lapangan telah mempunyai hipotesis terhadap persoalan yang hendak diteliti.

Pengumpulan data di lapangan dilakukan dengan wawancara secara mendalam kepada informan/partisipan utama ketua-ketua komunitas adat dan masyarakat adat, pendidik, kepala sekolah, komite sekolah, dewan sekolah, Dinas Pendidikan, Dinas Kebudayaan, Lembaga Non-Pemerintah yang peduli dengan persoalan komunitas adat. Data-data dari wawancara didukung dengan observasi. Disamping wawancara dengan informan pengumpulan data dilakukan Fokus Grup Diskusi di dua lokasi penelitian. Di samping itu, dalam pengumpulan data didukung dengan studi perpustakaan dengan melakukan pengumpulan sumber primer seperti artikel-artikel yang terkait dengan penelitian seperti jurnal ilmiah, disertasi, tesis, laporan hasil penelitian, serta sumber sekunder seperti buku-buku dan sumber-sumber yang relevan seperti arsip dan dokumen-dokumen penting.

1.4.3 Analisis Data

Berdasarkan atas *pre-study* diperoleh jawaban sementara terhadap persoalan dalam penelitian ini, yaitu bahwa dalam pelayanan pendidikan bagi komunitas adat telah melupakan budaya masyarakat pendukungnya. Hal itu dapat dilihat dari dasar kebijakan yang menaungi pelayanan pendidikan bagi komunitas adat, yaitu Permendikbud Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus telah mengabaikan nilai budaya komunitas adat dalam penyusunannya. Karena itu, dalam tingkat implementasi program pelayanan pendidikan bagi komunitas adat ini kurang memenuhi rasa keadilan.

Berdasarkan atas dugaan sementara penelitian tersebut lalu dilakukan pendalaman berdasarkan data-data di lapangan. Berdasarkan data-data di lapangan itu lalu dilakukan analisis dengan membuktikan hipotesis bahwa di dalam pelayanan pendidikan bagi komunitas masyarakat adat di kedua wilayah penelitian itu, di Suku Baduy dan Suku Laut telah mengabaikan nilai budaya masyarakat pendukungnya. *Pre-study* dan pendalaman data-data di lapangan digunakan untuk melakukan kritik/evaluasi terhadap Permendikbud Nomor 72 Tahun 2013 dan program pelaksanaannya terkait dengan pelayanan pendidikan bagi komunitas adat. Selanjutnya, berdasarkan atas *pre-study* dan pendalaman lapangan akan disusun model-model pelayanan pendidikan bagi komunitas adat sehingga dalam program pelaksanaannya memenuhi tuntutan rasa keadilan bagi masyarakat adat yang bersangkutan.

1.5. Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoretis

- a. Penelitian ini diharapkan memiliki kontribusi yang tinggi dalam membantu pengembangan ilmu pengetahuan khususnya memperluas ilmu pengetahuan pendidikan dan kebudayaan (*expanding knowledge*) ke arah kebijakan dan program pendidikan khusus bagi komunitas adat di daerah-daerah terpencil;
- b. Secara teoretis, penelitian ini juga memiliki signifikansi yang tinggi dalam membantu perkembangan literatur pendidikan dan kebudayaan yang berkembang dewasa ini khususnya menutup gap yang

ada dengan kurang tersedianya penelitian kebijakan dan pendidikan khusus komunitas adat terpencil.

1.5.2 Manfaat Kebijakan

- a. Penelitian ini memiliki signifikansi yang tinggi dalam inovasi kebijakan dan pencapaian program pemerintah Wajib Belajar 12 Tahun bagi komunitas adat daerah terpencil;
- b. Penelitian ini bermanfaat dalam mendukung kebijakan dan program pemerintah dalam membangun Indonesia dari Pinggiran melalui Penguatan Daerah-Daerah dan Desa melalui pelayanan pendidikan bagi anggota komunitas adat terpencil;
- c. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PK-PLK) khususnya rekomendasi kebijakan terkait dengan model pelayanan pendidikan khusus bagi semua anggota komunitas adat terpencil baik melalui pendidikan informal dan non-formal maupun melalui pendidikan formal;
- d. Penelitian ini juga diharapkan bermanfaat bagi Direktorat Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi, khususnya berkaitan dengan inovasi kebijakan dan program pemberdayaan komunitas adat melalui bidang pendidikan berdasarkan sistem nilai dan tradisi yang dimiliki komunitas adat terpencil.

1.5.3 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat praktis sebagai berikut:

- a. Hasil-hasil dan rekomendasi penelitian ini dapat dijadikan dasar ilmiah dalam rangka merevisi praktik-praktik perbaikan pendidikan bagi terwujudnya program Wajib Belajar 12 Tahun di seluruh Indonesia khususnya di komunitas-komunitas adat terpencil;
- b. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh para peneliti lainnya yang berminat dalam topik dan masalah yang sama;

c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar dalam merevisi model sistem pendidikan yang tepat agar komunitas-komunitas adat daerah terpencil tidak terpisahkan dari pendidikan formal.

BAB II

PELAYANAN PENDIDIKAN KOMUNITAS ADAT SUKU LAUT

2.1 Gambaran Umum Masyarakat Suku Laut

Mereka bukanlah nelayan yang umumnya saat malam pergi melaut dan saat siang datang, pulang kembali ke daratan. Mereka adalah nelayan yang 'pantang' pulang ke daratan. Setiap jengkal hidup mereka habiskan di laut. Sejak fajar menyingsing hingga matahari menghilang di ujung timur cakrawala. Mulai dari makan hingga minum. Mulai dari terbangun hingga terlelap. Bahkan untuk bercinta dan melahirkan sekalipun, mereka lakukan di atas laut. Di dalam sampan yang mereka namakan Kajang. Seperti inilah Suku Laut menjalani hidup dan kehidupan. Di atas laut yang luas dan terbuka.

Bagi Suku Laut, laut telah menjadi takdir. Sesuatu yang sepertinya mutlak harus mereka terima sebagai sebuah kehidupan. Hampir semua kehidupan mereka tak terpisahkan dari laut. Air laut yang asin, anyir bangkai ikan, ombak, bakau, serta sinar matahari yang membakar adalah sesuatu yang mereka telan setiap hari. Suku Laut dan laut telah menjadi sebuah kesetiaan. Tidak terpisahkan.

Biasanya satu kelompok Suku Laut bisa mencapai 30-an kajang. Satu kajang biasanya dihuni satu keluarga yang anak-anaknya masih kecil, di bawah 10 tahun. Jika anak, terutama laki-laki, telah beranjak remaja akan dibuatkan kajang sendiri oleh sang ayah. Di atas kajang itulah kehidupan mandiri seorang Suku Laut dimulai. Si remaja akan belajar mencari ikan sendiri guna memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk memasak sendiri. Di atas kajang itu pula, ia akan mulai mencari pasangan hidup dan hidup bersama membentuk keluarga baru. Begitu seterusnya siklus kehidupan Suku Laut berjalan. Kelompok Suku Laut akan mendarat di satu pulau ketika mereka hendak mengambil air bersih, mengebumikan anggota kelompok yang meninggal, dan menjual ikan hasil tangkapannya. Tidak ada pulau tetap yang mereka singgahi, dimana mereka memerlukan kebutuhan hidup, di sana mereka akan berlabuh. Sebelum tahun 1990, Suku Laut adalah kelompok masyarakat yang tidak mengetahui perhitungan uang. Mereka menjual ikan-ikan kepada para toke (penadah) dan

langsung menukarkannya dengan barang kebutuhan pokok, mulai dari beras, sayur, jajanan, pakaian, dan lainnya.¹

Berlama-lama waktu, Suku Laut kerap mendapat label dari pemerintah Orde Baru sebagai bagian dari suku terasing atau suku terbelakang yang komunitasnya termasuk dalam kategori masyarakat *pre-villages*. Suku Laut diposisikan di area terluar (periferi) dan menempati ranking atau derajat sosial terendah dalam hierarki 'dunia Melayu'. Mereka dianggap bukanlah bagian dari apa yang disebut kaum aristokrat Melayu sebagai 'umat', untuk menyebut bangsa Melayu yang 'homogen'. Mereka dianggap bukan umat karena tidak menjalankan adat Melayu, tidak memeluk agama Islam, berbahasa dan berdialek Melayu, serta berpenampilan seperti lazimnya orang Melayu.

Hal ini disebabkan oleh cara pandang Suku Laut terhadap daratan yang berbeda dengan orang Melayu. Dalam logika orang Suku Laut, adalah hal yang tidak masuk akal tinggal di daratan, sebab mereka anggap daratan merupakan tempat untuk mengubur jenazah kerabat yang telah meninggal. Karena itu, tanah atau daratan adalah tempat yang kotor, sehingga tidak layak untuk didiami. Menyiasati hal itu, pemerintah kemudian berstrategi untuk mengirim beberapa orang Melayu untuk mengislamkan orang Suku Laut. Para penyebar agama yang dilakukan dari pulau satu ke pulau lainnya ini berupaya menanamkan nilai baru bahwa tinggal di perahu tidak dapat menjaga kebersihan dari najis, dan karenanya tidak bisa beribadah (shalat). Selain itu, orang Suku Laut dihimbau menjadi muslim sehingga mereka mendapat bantuan dari pemerintah, berupa KTP, fasilitas rumah, pendidikan, perahu bermotor, dan lain sebagainya.

Hal-hal tersebut tidak sepenuhnya direspon secara positif oleh Suku Laut untuk sertamerta menjadi muslim. Mereka memang mendeklarasikan sebagai muslim, namun hal ini hanya digunakan agar mereka mendapat bantuan pemerintah. Selebihnya, mereka tetap mempraktikkan tatacara hidup mereka seperti biasa yang mana sangat berbeda dengan orang Melayu pada umumnya. Ini merupakan wujud resistensi sekaligus kegagalan misi pemerintah untuk mengakulturasi (baca: mengislamkan) budaya orang Melayu ke dalam budaya orang Suku Laut.

Secara budaya dan sejarah, Kepulauan Riau selalu menjadi milik dari alam Melayu yang didasari pada silsilah keturunan kerajaan. Wilayah ini telah

¹Hamidy, *Masyarakat Terasing, Daerah Riau, di Gerbang, abad XXI.*, 1991, Zamrad, Pekanbaru

menjadi daerah kekuasaan dari kesultanan Malaka-Johor yang dikuasai oleh dinasti Melayu yang bertempat tinggal di Semenanjung Melayu (1400-1699) yang kemudian menjadi pusat kekuasaan dari kesultanan Riau-Lingga yang diatur oleh koalisi dari dinasti Melayu dan Bugis yang berkedudukan di Kepulauan Riau (1722-1911). Hal ini menjelaskan asal mula kemelayuan, yaitu sebuah kategori afiliasi budaya yang pada dasarnya diasosiasikan dengan ketaatan pada Islam, bahasa Melayu, dan adat-adat kebiasaan Melayu.

Kontak antara orang laut dengan anggota dari kelompok etnik yang lainnya tidak bisa didiskusikan tanpa melihat Kepulauan Riau sebagai daerah yang sedang menghadapi perubahan ekonomi dan teknologi yang sangat cepat. Perubahan-perubahan secara langsung berakibat terhadap alam dan lingkungan sosial-budaya mereka.

Proses pembangunan ekonomi mempengaruhi kawasan yang menjadi tempat tinggal orang laut dan mengubah struktur demografi yang berdampak pada ciri utama kehidupan orang laut berupa kelompok yang kecil dan hidup dalam kelompok yang bergerak. Perhatian terhadap perubahan ini mendesak kebutuhan untuk berasimilasi dengan masyarakat luas. Desakan untuk mulai meninggalkan cara hidup tradisional yang nomaden menjadi menetap mulai dibutuhkan. Sejak diterapkannya kebijakan relokasi (permukiman) oleh Pemerintah Indonesia pada akhir 1980-an hingga periode awal 1990, kebiasaan atau adat Suku Laut berangsur menghilang.²

Dalam kontak antar etnik, orang Melayu sebagai penduduk mayoritas yang bertempat tinggal di daerah ini merupakan penduduk yang dilihat secara budaya dan historis amat dekat dengan orang Suku Laut. Di sisi lain, orang Melayu merupakan kelompok yang menghindari kontak sosial dari Suku Laut. Dalam pandangan mereka, orang Suku Laut merupakan masyarakat tanpa agama dan kebudayaan, bahkan mereka seringkali dianggap kotor atau najis. Pandangan ini berakar pada pemahaman mereka tentang pola hidup orang Suku Laut yang hidup berdesak-desakan dalam sebuah sampan kecil dan kebiasaan mereka memburu babi liar dan memakan dagingnya, minum alkohol dan memelihara anjing.

²<http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbkepri/2016/06/14/orang-laut-kepulauan-riau/>

Suku laut memiliki tingkat kolektivitas yang tinggi. Dalam komunitas mereka, Suku Laut memandang prinsip berbagi dan membantu sebagai hal yang sangat penting. Walaupun Suku Laut tidak memperlihatkan solidaritas antara sesama mereka, mereka mempunyai semangat kebersamaan yang tinggi.

Dalam dokumen resmi pemerintah, kita dapat melihat bagaimana negara secara eksplisit berasumsi bahwa kelompok masyarakat yang dikategorikan sebagai masyarakat terasing adalah masyarakat ‘lapisan bawah’ dan ‘tidak berdaya’ di antara seluruh lapisan masyarakat di Indonesia, yang “dalam strata perkembangan kemasyarakatan menyandang berbagai masalah sosial”.

Secara simbolis, primordialisme Suku Laut muncul dalam kontestasi wacana antara siapa Melayu ‘asli’ dan ‘tidak asli’ di dalam relasinya dengan orang Melayu. Siasat-siasat Suku Laut atas pilihan beragama, kepemilikan atas sesuatu, hingga hubungan ekonomi-pertukaran baik di lingkup kerabat Suku Laut maupun dengan pihak di luar kelompoknya menjadi bukti bahwa simbol-simbol budaya ini perlu mereka pertahankan agar tidak tunduk pada hegemoni suku bangsa dominan, yakni orang Melayu-Islam.

Suku Laut di Provinsi Kepulauan Riau telah berubah seiring dengan agenda pembangunan. Mereka tidak lagi hidup dalam kultur *zeeno-maden*—hidup mengembara dengan sampan di lautan bebas, tidak pula melakukan aktivitas ekonomi subsisten. Mereka kini hidup dalam paradoks: hendak menjadi manusia ‘modern’ atau bertahan dengan ‘tradisi’ moyang mereka dengan segala konsekuensinya.

Dalam konteks wilayah kultural Suku Laut yang sebagian besar adalah laut, maka hampir tiada lagi tempat bagi suku ini berpijak dan mencari kebutuhan pokok mereka secara bebas. Kondisi inilah yang menyebabkan mereka terpaksa ‘menetap’ di satu-dua tempat, dan tidak lagi bisa hidup berpindah sesuka hati.

Dalam perkembangannya kemudian, mereka pun tersingkir dari ranah budayanya dan tergilas oleh proyek-proyek negara maupun kaum pemodal yang berorientasi pada pembangunan atau modernisasi (mulai dari penataan wilayah hingga pengembangan daerah pariwisata maritim). Ketersingkiran mereka dari area kulturalnya ini juga membuat perubahan dalam pola hidup mereka dan dari sini mereka harus bernegosiasi dengan tatanan sosial-budaya ‘daratan’ atau

kepulauan (teritori budaya orang Melayu) tempat mereka ‘dilabuhkan’ yang sebelumnya tidak pernah terjadi.

2.2 Lokasi dan Geografi

Secara geografis, Suku Laut atau sering juga disebut Orang Laut tinggal di wilayah yang menjadi gerbang Indonesia di sebelah Barat Laut tepian negeri, berbatasan langsung dengan Selat Malaka dan Singapura. Secara lebih luas, istilah Orang Laut mencakup berbagai suku dan kelompok yang bermukim di pulau-pulau dan muara sungai di Kepulauan Riau-Lingga, Pulau Tujuh, Kepulauan Batam, dan pesisir dan pulau-pulau di lepas pantai Sumatera Timur dan Semenanjung Malaya bagian selatan. Secara *de facto*, Suku Laut merupakan kelompok etnis dalam jumlah kecil di tengah mayoritas masyarakat Melayu.

Dalam penelitian ini difokuskan pada Suku Laut yang berada di wilayah Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Mereka hidup di atas perahu dan selalu berpindah-pindah tergantung kepada iklim dan musim. Suku Laut yang berada di beberapa wilayah di Kabupaten Lingga ini seperti di Desa Kelumu, Pulau Lipan, Pulon Desa Mentude, Pulau Mengkuang Desa Tanjung Kelit, Kampung Baru Tajur Biru, Linau, Pulau Senang Desa Temiang, Desa Penaah, Desa Batu Belubang dan ada di beberapa daerah lainnya. Suku Laut ini telah lama ada di Lingga sejak zaman kerajaan Johor-Pahang-Riau-Lingga.

Kabupaten Lingga sendiri secara ruang wilayah, mencakup wilayah administrasi Kabupaten Lingga-Provinsi Kepulauan Riau dengan luas wilayah daratan dan lautan berdasarkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau.

Berdasarkan UU RI seperti tersebut di atas, wilayah Kabupaten Lingga mempunyai luas wilayah daratan dan lautan mencapai 211.772 km² dengan luas daratan 2.117,72 km² (1%) dan lautan 209.654 km² (99%), dengan jumlah pulau 531 buah pulau besar dan kecil, serta 447 buah pulau di antaranya belum berpenghuni. Namun, berdasarkan data eksisting luas wilayah Kabupaten Lingga sebesar 455.086,60 km² yang terdiri dari luas daratan sebesar 2.235,51 km² (4,91%), dan lautan sebesar 432.731,50 km² (95,09%).

Secara administrasi, pemerintahan Kabupaten Lingga terdiri dari 5 Kecamatan (Kecamatan Singkep, Kecamatan Singkep Barat, Kecamatan Lingga, Kecamatan Lingga Utara, dan Kecamatan Senayang), dan 59 Desa/Kelurahan.

Kabupaten Lingga terletak di antara $0^{\circ}00'$ - $1^{\circ}00'$ Lintang Selatan dan $103^{\circ}30'$ - $105^{\circ}00'$ Bujur Timur. Adapun batas wilayah Kabupaten Lingga, antara lain:

- a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Galang Kota Batam dan Laut Natuna.
- b. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Laut Natuna.
- c. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Laut Bangka dan Selat Berhala.
- d. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Laut Indragiri (Provinsi Riau).

2.3 Demografi

Berdasarkan data terakhir pertengahan tahun 2009 (data aggregate kependudukan), jumlah penduduk di Kabupaten Lingga berjumlah 93.783 jiwa dengan jumlah rumah tangga (kepala keluarga) sebanyak 19.344 kepala keluarga (KK). Jumlah penduduk Kabupaten Lingga terdiri dari 48.401 jiwa penduduk laki-laki dan 45.382 jiwa penduduk perempuan yang tersebar di 5 kecamatan dan 51 desa dan 6 kelurahan di Kabupaten Lingga. Dilihat dari jumlah rumah tangga, Kecamatan Singkep merupakan kecamatan dengan jumlah kepala keluarga (KK) terbanyak karena kecamatan ini merupakan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak. Jumlah rumah tangga di Kecamatan Singkep adalah sebanyak 6.228 kepala keluarga dan Kecamatan yang jumlah rumah tangganya paling sedikit adalah Kecamatan Lingga Utara dengan jumlah rumah tangga sebanyak 2.675 kepala keluarga.

Jumlah Orang Laut di Kepulauan Riau lumayan besar. Data tahun 1972 dari Jawatan Sosial Tanjungpinang, jumlah Orang Laut di Riau (dimekarkan menjadi Kepri), 5205 orang. Jumlah suku terasing totalnya 21.711 orang. Perinciannya, Suku Sakai 4075 orang, Talang Mamak 6165 orang, Suku Orang Hutan 2938, Suku Bonai 1428 orang dan Suku Akik 1900 orang. Kini 40-an tahun berlalu, Orang Laut di Kepri masih banyak ditemukan. Ada yang sudah bermukim dan ada yang masih mengembara di laut. Banyak pemukiman orang laut yang dibangun pemerintah. Sebut saja di Pulau Lipan, Kelumu, Sungai Buluh, Tanjungkelit, Kelumu dan Tajur Biru di Kabupaten Lingga. Di Bintan juga ada

di Air Kelubi, sementara di Batam, Orang Laut dibuat pemukiman di Pulau Bertam.³

2.4 Sejarah

Dari manakah asal Suku Laut? Ini lazimnya sebuah pertanyaan awal dari penelitian. Sebutan lain untuk Suku Laut atau Orang Laut adalah Orang Selat. Orang Laut kadang-kadang dirancukan dengan suku bangsa maritim lainnya, atau Orang Lanun. Orang suku laut memiliki bermacam penamaan. Penamaan ini muncul dari para peneliti ilmu sosial, masyarakat setempat (orang Melayu), maupun diri mereka sendiri. Di Indonesia, suku bangsa ini biasa dikenal sebagai Orang Laut atau Suku Sampan.

Istilah ini disepakati orang Melayu, bukan hanya berlaku bagi orang suku laut sebagai masyarakat pengembara lautan (*sea nomads*) saja, melainkan juga kepada masyarakat yang tinggal di sepanjang garis atau pesisir pantai yang ada di Kepulauan Riau. Mereka memang awalnya merupakan bagian dari Suku Laut.

Dari secukupnya *browsing* data,⁴ terdapat berbagai macam versi mengenai asal-muasal Orang Laut. Mulai dari narasi sejarah-geografis dan pelukisan sosiokultural yang dibangun para akademisi Barat, maupun mitos dan legenda yang lahir dari masyarakat mereka sendiri.

Namun, Suku Laut yang tinggal di Lingga Kepulauan Riau, menurut hasil penelitian, diduga kuat sejumlah peneliti merupakan suku bangsa asli Melayu keturunan bangsa Melayu tua. Atau, masuk dalam proto Melayu yang menyebar di Pulau Sumatra, melalui Semenanjung Malaka pada sekitar 2500-1500 SM.

Dalam perkembangannya kemudian atau pasca-1500 SM, terjadi arus besar migrasi bangsa deutro Melayu ke Asia Tenggara yang membuat bangsa proto Melayu terdesak ke wilayah pantai (pesisir daratan) di Pulau Sumatra. Sebagian dari kelompok yang terdesak inilah yang saat ini dikenal sebagai orang Suku Laut.

³<http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbkepri/2016/06/14/orang-laut-kepulauan-riau/>

⁴ Kajian tentang Suku Laut di Lingga maupun di berbagai wilayah Kepulauan Riau sudah cukup banyak dilakukan oleh peneliti terutama dari mancanegara seperti David Sopher, Sandbukt, Lenhart, Thompson, Chou dan Trisnadi. Karena kesulitan mencari literatur tersebut, di sini penulisan dilakukan melalui cara mereseume atau mengambil hal-hal penting yang terkait dengan bahasan.

Beberapa sejarah mencatat bahwa Suku Laut ini terbentuk dari lima periode kekuasaan, yakni masa Batin (kepala klan), Kesultanan Melaka-Johor dan Riau-Lingga, Belanda (1911-1942), Jepang (1942-1945), dan Republik Indonesia (1949 sampai sekarang). Ada yang mengatakan bahwa Suku Laut ini asalnya adalah para perompak yang memiliki pengaruh kuat pada masa Kerajaan Sriwijaya, Kesultanan Malaka dan Kesultanan Johor.⁵

Di Riau sebenarnya tidak hanya dihuni ‘Suku Laut’ tetapi juga ada suku lain. Ada Suku Sakai yang mendiami daerah hutan dan sepanjang aliran sungai. Tepatnya di daerah Duri. Bagi masyarakat Sakai, hutan adalah sebuah detak nadi kehidupan yang mengandung unsur magis dan penuh arti bagi kehidupan mereka. Kebersatuan dengan alam adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar. Budaya inilah yang sangat melekat erat dan sangat sulit untuk dipisahkan dari setiap unsur kehidupan mereka. Oleh karena berartinya hutan bagi mereka, orang Sakai juga telah mengelola hutan sedemikian rupa, agar rantai kehidupan yang mereka jalani tetap berlanjut. Sementara, ada suku bangsa Akit yang berdiam di Pulau Rupat, sebuah pulau di wilayah Propinsi Riau. Pada masa lampau kegiatan hidup mereka lebih banyak dilakukan di perairan laut dan muara-muara sungai. Mereka mendirikan rumah di atas rakit-rakit yang mudah dipindahkan dari satu tepian ke tepian lain.

2.5 Budaya

Salah satu kebudayaan Suku Laut yang terkenal adalah Tari Campak Laut. Tarian ini mirip tarian Melayu yang dipadukan dengan berbalas pantun. Suku Laut selalu memegang komitmen kuat akan kehormatan dan jati diri mereka. Mereka tidak mau beralih pada profesi lain selain nelayan, mereka juga tidak tertarik hal-hal yang berbau daratan. Mereka hidup dan berbudaya selama berabad-abad di atas lautan. Mereka lahir, kawin dan mati di lautan. Laut adalah bagian dari kehidupan mereka.

Dalam kepercayaan, Suku Laut menganut animisme tapi beberapa di antara mereka sudah memeluk agama Islam, walaupun Islamnya masih bercampur dengan kepercayaan nenek moyang.

⁵<http://kebudayaanindonesia.net/kebudayaan/947/suku-orang-laut-kepulauan-riau>

Masyarakat Suku Laut cenderung memisahkan diri dari suku lain. Mereka juga sangat kuat terhadap garis keturunannya. Seperti adat Melayu umumnya, Suku Laut mengambil garis keturunannya. Mereka hidup dan berbudaya selama berabad-abad di atas lautan, mereka lahir, kawin dan mati di lautan. Laut adalah bagian dari kehidupan mereka.

Gobang adalah salah satu bentuk tarian rakyat yang tumbuh dan berkembang di Kepulauan Riau, tepatnya di Jemaja Kabupaten Anambas. Bagi masyarakat Jemaja, tarian Gobang digunakan untuk memeriahkan acara sunatan, perkawinan dan hari besar lainnya.

Ada dua versi cerita asal usul kesenian Gobang, pertama Gobang diyakini sebagai kesenian tradisi masyarakat Suku Laut. Pada saat mereka mendarat ke pantai, maka selalu mengadakan acara pesta pora merayakan keberhasilan mereka dalam merompak. Sebagai bentuk ekspresi, mereka menari dalam berbagai gaya ragam gerak. Busananya juga tidak ada aturan. Kebiasaan ini terus berkembang dan bertahan sampai sekarang dengan penyesuaian bentuk sesuai perkembangan masyarakat. Gobang diyakini sebagai bentuk kesenian orang bunian (makhluk halus) di dalam hutan. Menurut cerita, ada seorang warga Jemaja yang tersesat di hutan. Tanpa disadarinya dia telah memasuki alam orang bunian. Dalam kebingungannya, orang tersebut melihat sekelompok makhluk bunian yang sedang berpesta pora. Rupa dan bentuk mereka sangat menyeramkan. Baju mereka yang berwarna-warni mencolok, membuat suasana lebih menyeramkan. Di antara makhluk tersebut ada yang membawa ternak hasil curian. Setelah dapat keluar dari alam bunian, orang tersebut menceritakan kepada teman-temannya. Mereka secara bersama-sama mencoba mencontoh bentuk orang bunian yang diceritakan oleh temannya tersebut. Lalu mereka bermain bersama-sama, menari dan bergembira. Rupanya permainan itu begitu menarik sehingga terus dipertahankan sampai sekarang.⁶

Religi yang mengatur perilaku Orang Laut mengandung konsep dasar animisme-shamanisme, tetapi tidak meliputi semua aspek kehidupan mereka. Keyakinan mengenai hal-hal yang bersifat gaib mempengaruhi perilaku menanggapi ruh-ruh, kekuatan-kekuatan gaib, hari baik dan naas, hantu-hantu, mambang dan peri, dan sekaligus mencerminkan kekhawatiran mereka terhadap berbagai ancaman dunia gaib yang dapat merugikan atau mencelakakan kehidupan mereka.

⁶<http://disbud.kepriprov.go.id/kesenian-gobang/>

Sistem hubungan kekerabatan Suku Laut cenderung bilateral dan garis keturunan yang ambilineal, tetapi rumah tangga mereka biasanya terbentuk dari keluarga inti neolokal. Namun, seperti adat Melayu umumnya, Suku Laut mengambil garis ayah sebagai garis keturunannya. Dalam mencari pasangan kawin mereka memakai ketentuan eksogami klen. Pasangan-pasangan baru cenderung untuk tinggal dekat kelompok orang tua si isteri, tetapi kemudian setelah mampu berdiri sendiri mereka bebas untuk bergabung dengan kelompok lain. Masyarakat Suku Laut cenderung memisahkan diri dari suku lain. Mereka juga sangat kuat terhadap garis keturunannya.

Orang Suku Laut merupakan orang-orang yang mengandalkan penangkapan ikan sebagai nafkah hidup mereka. Mereka bermatapencaharian sebagai nelayan. Kebanyakan dari mereka tinggal di atas rumah perahu. Terkadang mereka sering pindah, untuk itu mereka hanya kenal dengan sukunya sendiri.

Ditilik dari ragam bahasa yang digunakan, Suku Laut dianggap masih serumpun dengan bangsa Melayu. Menurut ahli sosiolinguistik K Alexander Adeelar (2004), Orang Laut merupakan varian suku bangsa Melayu tua apabila dilihat dari ragam bahasa tutur yang dipakai. Argumen yang dibangun Adeelar merujuk pada pola persebaran elemen-elemen bahasa Melayu pada masa awal abad ke-16 yang hingga kini masih ditemukan dalam ragam percakapan modern bahasa Melayu. Artinya, bahasa Orang Laut memiliki kemiripan dengan Bahasa Melayu dan digolongkan sebagai Bahasa Melayu Lokal.⁷

Sementara, bagi peneliti yang melihat kebudayaan orang Suku Laut dari perspektif evolusionis, kebudayaan orang laut secara umum berbeda dengan budaya orang Melayu. Kendati, masih tampak elemen-elemen 'Melayu' dalam kehidupan kesehariannya. Hal ini bisa dilihat salah satunya dalam aktivitas Orang Laut yang mempraktikkan pantun di waktu senggang. Sementara itu, perbedaan kultural yang paling kasat mata, terletak pada struktur sosial (sistem kekerabatan dan relasi antargender) dan budaya materinya.⁸

Secara struktur sosial, orang laut masih hidup dalam lingkup kelompok yang tidak terlalu besar atau sekitar lima sampai delapan keluarga inti. Kelompok yang masih dalam satu kerabat ini dipimpin seorang laki-laki yang ditunjuk

⁷<http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbkepri/2016/06/14/orang-laut-kepulauan-riau/>

⁸<http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbkepri/2016/06/14/orang-laut-kepulauan-riau/>

melalui sebuah musyawarah. Pemimpin ini berfungsi sebagai perantara ketika menjalin komunikasi dengan Suku Laut yang tersebar di Kepulauan Riau. Walau pemimpinnya seorang laki-laki, relasi antargender (laki-laki dengan perempuan) cukup egaliter dalam praktik kehidupan sosialnya. Hal ini didasari kesepakatan bersama, biasanya dimulai dari himpunan keluarga terkecil yang telah menetapkan pembagian peran secara seksual serta posisi sosial masing-masing.

Anak-anak Suku Laut pada umur 6-12 tahun tahu tentang sopan santun terhadap orang yang lebih tua dan sebaya dan tahu perbuatan yang baik dan mana yang tidak. Minat mereka ingin menuntut ilmu itu ada. Namun, ada hal yang sering membuat mereka (anak Suku Laut) tidak mau belajar salah satunya dorongan dan motivasi dari orang tua. Penghambat lain anak-anak Suku Laut banyak tidak bersekolah dan bahkan putus sekolah yakni, faktor ekonomi menjadi bumerang utama anak Suku Laut tidak bersekolah. Kehidupan orang tua mereka yang sering berpindah-pindah atau dikenal masyarakat nomaden ini juga penyebab anak-anak Suku Laut jarang datang untuk menuntut ilmu. Anak Suku Laut lebih menyukai mengikuti orang tuanya kerja yang rata-rata nelayan dan pemburu.⁹

Kebiasaan anak Suku Laut yang menarik lagi di antaranya mereka lebih senang bernanyi dan menggambar. Antusias anak Suku Laut untuk belajar dan mengenal dunia pendidikan cukup bagus. Namun pola pikir orang Suku Laut cukup berbeda dengan masyarakat lainnya. Anak-anak Suku Laut banyak yang tidak memikirkan sekolah atau pendidikannya. Sebab pagi-pagi mereka sudah mengikuti keluarga mereka kemana-mana. Ada yang ke pulau dan melaut.¹⁰

2.2.1 Pendidikan bagi Suku Laut

Sulit untuk menggambarkan kondisi yang tepat mengenai pelayanan pendidikan yang pernah diperoleh dan/atau diberikan oleh negara bagi warga Suku Laut di Selat Kongky Kabupaten Lingga. Melihat kondisi pendidikan mereka saat ini, sulit untuk membuat gambaran umum untuk menjelaskan situasi yang sebenarnya; tak banyak yang mengetahui atau peduli dengan nasib pendidikan anak-anak Suku Laut karena kompleksitas masalah yang dihadapi bagai benang kusut. Potret buram mewarnai kehidupan anak-anak Suku Laut

⁹<http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbkepri/2016/06/14/orang-laut-kepulauan-riau/>

¹⁰<http://anjonofarofhasudungan.blogspot.co.id/2015/03/kehidupan-pendidikan-di-suku-laut.html>

yang bernasib malang karena tak dapat memperoleh pendidikan yang layak sebagaimana yang diterima oleh masyarakat pada umumnya.

Menurut penuturan masyarakat setempat bahwa Suku Laut identik dengan keterbelakangan; keterisoliran, kehidupan tidak menentu/berpindah-pindah, penghasilan rendah, dan kurangnya akses pendidikan bagi mereka sebagai penyebab utama ketertinggalan di bidang pendidikan. Masalah pendidikan ini dikatakan sebagai suatu persoalan yang krusial mengingat masyarakat yang tersebar di pesisir pantai Kabupaten Lingga tersebut menuntut adanya suatu upaya pemecahan masalah secara berencana, terintegrasi dan menyeluruh dalam waktu yang singkat dari semua pihak. Upaya pemecahan masalah pendidikan tersebut perlu didasarkan pada pemahaman terhadap karakteristik masyarakat agar tidak berbenturan dengan sistem nilai yang mereka pedomani.

Hasil wawancara dengan Kepala Suku Laut mengindikasikan bahwa hampir seluruh warga Suku Laut yang mendiami wilayah pesisir Kabupaten Lingga tidak dapat mengenal aksara dengan baik. Mereka adalah satu dari sekian banyak komunitas adat terpencil yang menjadi kantong buta aksara di Indonesia. Karena kehidupan mereka yang nomaden (berpindah-pindah di wilayah laut dan pesisir pantai), masyarakat Suku Laut sulit untuk menjangkau lokasi belajar yang disiapkan oleh pemerintah dan masyarakat. Kalau pun ada masyarakat yang peduli, namun tidak banyak, berupa relawan yang terpanggil untuk dapat membantu anak-anak Suku Laut keluar dari buta aksara. Relawan tersebut harus rela mengorbankan waktu, energi, dan materil untuk menjangkau kantong-kantong buta aksara dengan menggunakan perahu bermesin tempel (pompong; sejenis sampan yang bermesin). Namun, sambutan anak-anak yang antusias mau belajar mengenal huruf, membaca, menulis, dan berhitung (calistung) merupakan pengobat lelah setelah relawan menempuh perjalanan jauh untuk menjangkau lokasi. Hal yang menggembirakan selanjutnya adalah tingkat kecerdasan anak-anak Suku Laut boleh dibilang di atas rata-rata, semua tugas dapat dikerjakan dengan baik dan unik, dan diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat.¹¹

Fenomena keterbelakangan pendidikan masyarakat Suku Laut di atas adalah sebuah kenyataan yang membawa pada suatu konsekuensi logis bahwa pemerintah dan masyarakat perlu memperhatikan kondisi pendidikan mereka.

¹¹ Penuturan Desi Diaz (seorang relawan pemberatasan buta aksara untuk Suku Laut) pada saat FGD untuk keperluan penelitian ini di Dinas Dikpora, Kab. Lingga.

Untuk tujuan tersebut, setidaknya ada beberapa faktor umum yang menjadi penghambat pendidikan bagi warga Suku Laut, antara lain:

1. Berbentuk komunitas kecil; terdiri dari 5-10 keluarga per-kelompok dalam beberapa perahu “kajang” yang juga merupakan “rumah bagi keluarga mereka (ayah, ibu, dan antara 3-5 anak). Kelompok tersebut hidup berpindah-pindah sesuai dengan musim untuk berteduh dan menangkap ikan.
2. Tertutup dan homogen; rata-rata komunitas adat yang terpencil kurang membuka diri terhadap perubahan, demikian pula dengan keengganan untuk mengakses pendidikan.
3. Pranata sosial bertumpu pada hubungan kekerabatan yang dapat menjadi pendukung sekaligus penghambat program pelayanan pendidikan bagi mereka.
4. Pada umumnya terpencil secara geografis dan relatif sulit dijangkau dengan kendaraan darat. Hidup di wilayah pesisir laut dan berpindah-pindah hanya dapat dijangkau dengan perahu, dan menanyakan informasi keberadaan mereka.
5. Peralatan teknologinya sederhana dengan perahu layar, arah angin sangat menentukan di mana mereka akan berdomisili untuk sementara waktu.
6. Ketergantungan pada lingkungan hidup dan sumber daya alam setempat relatif tinggi terutama faktor musim menemukan lokasi yang aman di hulu sungai dari ombak, angin, dan cuaca; serta menentukan hasil tangkapan baik untuk dikonsumsi maupun untuk dijual.
7. Terbatasnya akses pelayanan sosial, ekonomi, dan politik. Rata-rata tidak memiliki KTP untuk mengakses pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah, termasuk berimplikasi pada sub-sektor pelayanan pendidikan.

Hasil identifikasi berbagai faktor umum penghambat akses pendidikan warga Suku Laut sebenarnya merupakan gejala umum yang terjadi pada sebagian besar komunitas adat terpencil di Indonesia. Namun, bagi warga Suku Laut terdapat keunikan tersendiri, yaitu; lokus perairan di mana mereka menjalani kehidupan turun-temurun; menyerahkan kehidupan pada kemurahan alam bahari; dan tidak

pernah menuntut persamaan perlakuan meski mereka sebenarnya adalah pemilik ibu pertiwi. Untuk itu, ada baiknya melakukan pembahasan terhadap berbagai faktor penghambat pendidikan bagi warga Suku Laut pada bagian berikut ini.

2.2.2 Hambatan Akses Pendidikan

Hambatan akses pendidikan yang dibahas pada bagian ini mencakup: kendala geografis, infrastruktur, ketersediaan sumber daya, budaya masyarakat, tingkat perekonomian, dan kebijakan pemerintah daerah. Selengkapannya sebagaimana paparan berikut ini.

2.2.2.1 Kendala Geografis

Kendala geografis menjadi penyebab keterisoliran masyarakat Suku Laut. Akibat dari keterisoliran tersebut, masyarakat Suku Laut jauh dari fasilitas pelayanan pemerintah, baik dari sudut ekonomi, kesehatan, pembangunan infrastruktur, dan pendidikan, serta interaksi sosial. Mereka bermukim di wilayah pesisir Kabupaten Lingga yang merupakan daerah yang letak teritorialnya berada jauh dari pusat pemerintahan. Hal tersebut berdampak pada minimnya pelayanan pendidikan khususnya untuk daerah-daerah pesisir pantai yang sulit dijangkau menggunakan transportasi darat. Kejadian ini biasanya disebabkan oleh medan-medan yang menjadi objek pelayanan cukup sulit untuk dijangkau, karena alasan transportasi, komunikasi dan masalah-masalah klasik lainnya, sehingga seringkali terabaikan oleh pemerintah daerah. Alat transportasi satu-satunya yang mereka gunakan pada umumnya berupa perahu “pompon” atau “kajang” yang sekaligus juga menjadi rumah tempat tinggal bersama dalam satu keluarga. Sedangkan, untuk bepergian jarak dekat atau dalam lingkungan atau dusun, ditempuh dengan berjalan kaki atau menggunakan angkutan pedesaan roda empat atau ojek sepeda motor. Mereka lebih berinteraksi dan berorientasi kepada desa terdekat menjual hasil tangkapan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Kesenjangan sosial ekonomi warga Suku Laut dengan masyarakat penduduk setempat mempengaruhi watak dan pola hidup masyarakat.

Sesuai pengalaman pada saat kunjungan lapangan, jarak tempuh untuk sampai dari Tangjung Pinang ke Kabupaten Lingga selama 6,5 jam menumpang kapal ferry. Untuk sampai ke lokasi warga Suku Laut dari ibu kota Kabupaten Lingga selama kurang lebih 1 jam lewat kendaraan darat dan selama kira-kira 1 jam lebih lewat perahu “pompong”. Teridentifikasi pula, perjalanan ke pemukiman

warga Suku Laut tidak dapat dilakukan setiap saat. Tidak ada transportasi umum yang khusus menuju lokasi tersebut. Satu-satunya cara untuk menuju sampai ke sana harus menyewa kapal motor milik masyarakat, dengan begitu warga Suku Laut yang hendak pergi ke ibu kota kecamatan atau kabupaten membutuhkan biaya yang cukup banyak. Selain itu, hambatan cuaca juga mempersulit warga untuk bepergian pada saat badai, begitu juga sebaliknya sehingga menyebabkan harga barang-barang menjadi lebih mahal.

2.2.2.2 Kendala Infrastruktur

Pada kelompok masyarakat Suku Laut yang sudah bermukim di wilayah pesisir pantai Kabupaten Lingga, pihak Dinas Sosial membangun fasilitas pendidikan SD 032 Kecamatan Senayang yang menyediakan 3 kelas (1 ruangan untuk 2 tingkatan kelas). Namun, sangat disayangkan bahwa sarana dan prasarana yang dibangun tersebut tidak terawat dengan baik sehingga terkesan terbengkalai. Hal tersebut menjadi salah satu hambatan utama yang merintanginya berlangsungnya proses pembelajaran dengan baik di sekolah tersebut. Hambatan lain adalah masalah minimnya sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran, sehingga seringkali guru harus memutar otak untuk memenuhi kriteria minimal pembelajaran. Apalagi bobot materi yang harus diajarkan harus sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Bangku, kursi, dan papan tulis yang dibuat seadanya tidak mampu memberikan fasilitas yang memadai sebagaimana sekolah-sekolah normal pada umumnya. Sayangnya perhatian pemerintah daerah lewat Dinas Sosial tersebut tidak begitu nyata dirasakan dampaknya oleh masyarakat Suku Laut. Gambaran infrastruktur tersebut berlaku pada komunitas suku laut yang telah bermukim, lalu bagaimana nasib pelayanan pendidikan bagi mereka yang masih hidup berkelompok dan terpencar di pesisir Kabupaten Lingga? Sudah bisa dibayangkan nasib pendidikan mereka, mungkin lebih parah atau bahkan lebih buruk dibanding dengan warga Suku Laut yang sudah bermukim.

2.2.2.3 Ketersediaan Sumberdaya

Ketersediaan sumberdaya pendidik dan tenaga kependidikan masih memprihatinkan. Menurut hasil identifikasi terdapat 2 jenis sumberdaya pendidikan yang membantu proses pembelajaran dan pengentasan buta aksara bagi warga Suku Laut.

2.2.2.3.1 Guru

Pada kasus SDN 32 Senayang, guru yang mengajar di sana sebanyak 3 orang guru dan kepala sekolah. Menurut keterangan kepala sekolah bahwa 2 di antaranya berstatus honorer, namun mereka tidak diterima dengan baik oleh penduduk karena lebih mementingkan berjualan untuk menambah penghasilan daripada menjalankan tugas sebagai guru di kelas. Hal ini disebabkan oleh gaji yang rendah, para guru honorer tersebut hanya bergaji 100-300 ribu sebulan yang kebanyakan honor komite atau dana BOS. Beban yang ditanggung oleh seorang guru di daerah tersebut tidak sebanding dengan imbalan yang didapatkan. Namun, karena kekurangan tenaga guru, para guru honorer tersebut banyak yang harus mengajar 2-3 kelas sekaligus. Tuntutan mengajar guru di daerah tersebut tergolong lebih berat bila dibandingkan daerah yang memiliki sumberdaya yang memadai karena selain harus memikirkan hidupnya juga harus memikirkan tanggungjawabnya sebagai seorang guru. Hal ini tentu menambah beban mental bagi guru yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah agar proses belajar mengajar di sekolah tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya.

2.2.2.3.2 Relawan

Sumberdaya lainnya adalah relawan yang berafiliasi dengan lembaga sosial maupun perorangan. Lensy Fluzianti atau akrab dipanggil Densi Diaz, adalah salah seorang relawan pemberantasan buta aksara yang beraktivitas di Selat Kongky Desa Pena'ah, Kabupaten Lingga yang sempat ditemui pada saat kunjungan lapangan. Meski bukan asli Lingga, sejak setahun terakhir hidup Diaz menjadi relawan di tengah-tengah warga Suku Laut dan menemukan berbagai persoalan mendasar kerana sejauh ini anak-anak di Suku Laut memang minim tersentuh pendidikan. Untuk itu, Diaz meminta agar Dinas Pendidikan (Disdik) lebih memfokuskan pelayanan pendidikan bagi mereka. Aktivitas relawan tersebut mendapat apresiasi dari Wakil Bupati Lingga, M. Nizar, dan berjanji untuk membantu Diaz untuk memenuhi segala kebutuhan dalam kaitannya dengan pekerjaannya.¹²

¹²<http://www.keprisatu.com/2016/03/31/Upaya-Penyetaraan-Suku-KAT-Masih-Jauh-Dari-Harapan.html>

2.2.3 Tingkat Perekonomian

Tingkat perekonomian bagi sebagian besar warga Suku Laut rata-rata masuk dalam kategori miskin.¹³ Tambahan pula, orang tua siswa dan masyarakat masih kurang sadar akan pentingnya pendidikan yang lambat laun akan menyerah dengan keadaan, sehingga terjadilah putus sekolah. Kebanyakan dari mereka lebih memilih bekerja “*memotong kayu*” di hutan untuk membantu orang tua menambah penghasilan, dengan alasan mereka sudah dapat membaca, menulis, dan berhitung. Mata pencaharian utama warga Suku Laut sebenarnya menjadi nelayan, namun tergantung musim. Sementara, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang tidak diperoleh, penduduk harus pergi ke ibu kota Kabupaten Lingga (Daik). Penghasilan yang diperoleh penduduk sebagai nelayan yang menangkap ikan di sekitar pesisir pantai hanya dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Akhirnya, banyak penduduk tidak dapat pergi ke ibu kota kecamatan atau kabupaten untuk memperoleh akses yang lebih luas seperti kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya yang telah tersedia. Dengan kurangnya penduduk mendapat akses yang lebih luas, menyebabkan pola pikir masyarakat tentang pendidikan dan lain sebagainya menjadi rendah. Melanjutkan sekolah bagi sebagian dari mereka adalah sesuatu yang hanya akan memperparah kemiskinan mereka.

2.2.4 Kebijakan Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah Kabupaten Lingga selama ini sudah berusaha untuk memenuhi dan melindungi hak-hak dasar masyarakat Suku Laut (hak sosial, ekonomi, dan politik). Pemerintah daerah juga telah mengakui eksistensi Suku Laut sebagai bagian dari warga negara NKRI dengan menganjurkan mereka mengurus KTP, Akta Kelahiran, dan Buku Nikah. Dokumen resmi tersebut berguna untuk dapat mengakses semua layanan pemerintahan, termasuk pendidikan. Namun, niat baik pemerintah daerah tersebut kurang mendapat tanggapan, disinyalir karena informasi tersebut belum tersosialisasi dengan baik mengingat kendala geografis dan transportasi. Suatu hal yang cukup menggembirakan, Pemda setempat berupaya semaksimal mungkin untuk menjadikan isu keterbelakangan Suku Laut di sektor pendidikan sebagai bagian

¹³ Menurut pengamatan peneliti pada saat kunjungan lapangan di daerah pemukiman Suku Laut yang disiapkan oleh Dinas Sosial (tempat hunian yang tergolong sederhana, penghasilan masih pas-pasan, dan sebagainya).

dari RPMD. Niat baik tersebut akan diwujudkan dalam sejumlah program dan penganggaran yang akan mendapat dukungan dari Bappeda dan dimuat dalam RKA-KL Dinas Pendidikan.¹⁴

Pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Riau juga gencar memprogramkan kegiatan sejak lima tahun terakhir untuk Komunitas Adat Terpencil (KAT) termasuk Suku Laut. Namun sayang pada kenyataannya masih banyak warga Suku Laut yang tidak tersentuh pendidikan yang layak karena belum memiliki legalitas kependudukan, buku pernikahan dan hak-hak anak. Tidak adanya buku pernikahan berakibat pada anak-anak mereka juga tidak memiliki akta kelahiran dan terancam tidak bisa ikut pendidikan formal. Lagi-lagi pelayanan publik bagi warga Suku Laut terkendala oleh urusan-urusan administratif.¹⁵

2.3 Alternatif Solusi

Mencermati kendala-kendala yang dihadapi dalam memberikan pelayanan pendidikan bagi warga Suku Laut, tentu dibutuhkan jenis pendidikan yang tepat. Menurut hemat peneliti, upaya pencerdasan warga Suku Laut dapat dilakukan dengan banyak cara dan metode, namun fleksibel dengan tidak meninggalkan kekhasan dari kekayaan khazanah adat istiadat, serta nilai dan norma yang mereka pedomani. Untuk itu, usulan dapat berupa *model pendidikan alternatif* yang ranahnya bisa formal, informal ataupun nonformal. Metode yang diberikan juga metode yang tidak menghilangkan kebiasaan positif mereka yang berasal dari akar rumput dan adiluhung secara turun-temurun. Sentuhan yang diberikan dalam pendidikan alternatif yang diberikan bagi masyarakat Suku Laut adalah sentuhan yang tulus dan khas karena keikhlasan dalam mendidik masyarakat pulau terpencil adalah hal utama yang harus dimiliki oleh para pendidik yang akan terjun ke sana.

Selain mengirimkan tutor dan pendidik yang handal untuk mendidik penduduk pulau terpencil tentunya teknologi juga akan berperan besar dalam proses pemberdayaan pendidikan bagi penduduk pulau terpencil. Teknologi ini harus dijaga agar tidak merusak kemurnian budaya masyarakat pada komunitas tersebut. Berbagai jenis teknologi informasi dan komunikasi yang tersedia dapat

¹⁴ Informasi diperoleh pada saat FGD antar peneliti dan berbagai instansi terkait di Dinas Dikpora Kab. Lingga.

¹⁵ <http://www.keprisatu.com/2016/03/31/Upaya-Penyetaraan-Suku-KAT-Masih-Jauh-Dari-Harapan.html>

digunakan untuk pembelajaran jarak jauh dan mandiri terutama untuk daerah terisolir. Tujuan pembelajaran jarak jauh adalah meningkatkan akses pendidikan bagi mereka yang kesulitan mengakses pendidikan model mainstream yaitu sekolah formal. Teknologi *teleconference*, *email*, televisi dan radio pendidikan, dan CD ROM adalah sarana yang tepat untuk mengatasinya. Pembelajaran jarak jauh ini kuncinya pada fleksibilitas penyampaian materi ajar.

Menurut berbagai sumber bahwa program-program pendidikan yang dapat diberikan bagi penduduk pulau terpencil, termasuk warga Suku Laut, antara lain:

1. Keaksaraan Dasar
2. Keaksaraan Keluarga
3. Keaksaraan Usaha Mandiri
4. Pendidikan Pemberdayaan Perempuan
5. Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender
6. Pendidikan Kesetaraan
7. Peningkatan Budaya Baca
8. Program Pendidikan Luar Sekolah yang berhubungan dengan peningkatan mutu kehidupan, seperti:
 - a. Pengembangan nilai-nilai etis, religi, estetis, sosial dan budaya;
 - b. Pengembangan wawasan dan cara berpikir;
 - c. Peningkatan kesehatan pribadi, keluarga dan lingkungan;
 - d. Peningkatan dan pengembangan pengetahuan di dalam arti luas (sosial, ekonomi, politik, ilmu-ilmu kealaman, bahasa, sejarah, dan sebagainya), serta;

- e. Apresiasi seni-budaya (sastra, lukis, tari, pahat, suara, tabuh, teater, dan sebagainya).¹⁶

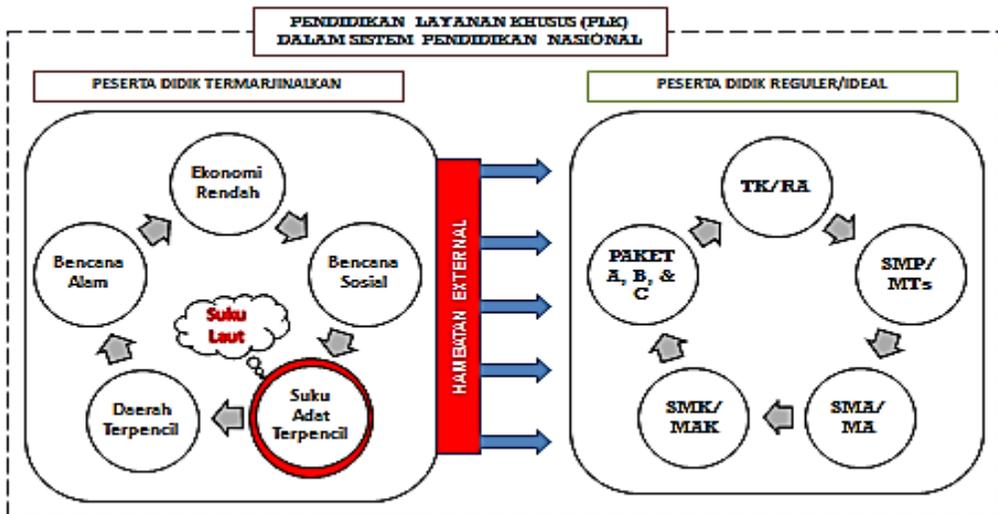
2.4 Pengembangan Model Pendidikan Layanan Khusus bagi Suku Laut

Komunitas Suku Laut di Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau memiliki karakteristik khusus yang tidak dimiliki oleh kelompok masyarakat atau suku lainnya di Indonesia. Suku asli ini mendiami pantai-pantai sepanjang pesisir Pulau Lingga, merupakan suku nomaden di lautan, berpindah-pindah mengikuti musim angin laut dan mencari pesisir yang aman dan tenang untuk melakukan perburuan ataupun hanya sekedar singgah dan beristirahat dan mencari air tawar. Berdasarkan karakteristik khusus yang dimilikinya, Suku Laut juga berhak mendapatkan pendidikan dan wajib mengikuti pendidikan dasar.¹⁷ Program pemerintah daerah di bidang pendidikan juga harus bersifat khusus dan spesifik, berupa pendidikan yang memang didesain khusus untuk melayani masyarakat Suku Laut. Jenis layanan pendidikan tersebut merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, dan/atau mengalami bencana alam, dan tidak mampu dari segi ekonomi.¹⁸

¹⁶ Diadaptasi dari Direktorat Kesetaraan, Kemdikbud

¹⁷ Menurut Undang-undang Dasar 1945 (amandemen), pasal 31, ayat (1): bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, ayat (2): Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

¹⁸ Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 32, Ayat (2)



Dalam pengembangan model Pendidikan Layanan Khusus (PLK) bagi komunitas Suku Laut dapat menjadi suatu bentuk sekolah alternatif yang mengakomodasikan pendidikan bagi anak-anak usia sekolah di pesisir laut Kabupaten Lingga yang sulit terjangkau, terpencil, terbelakang, dan tidak mampu dari segi ekonomi. Melalui program ini pemerintah daerah dapat memberikan pendidikan yang layak kepada masyarakat Suku Laut yang tersebar di sepanjang pesisir Lingga tanpa memaksa mereka pindah dan berumah di daratan yang dapat mencerabut mereka dari akar budayanya. Mengingat anak-anak ini sangat berbeda dari segi ekonomi, kondisi lingkungan, dan keadaan sosialnya dengan anak-anak didik yang bersekolah di sekolah reguler. Maka mereka sangat memerlukan penanganan khusus untuk memberikan motivasi/dorongan agar memiliki kepercayaan diri dan semangat untuk bersekolah.

2.4.1 Tujuan

Tujuan penanganan masalah pendidikan bagi warga Suku Laut, antara lain:

- a. Membuka akses pendidikan bagi warga Suku Laut seluas-luasnya (tanpa kecuali) terutama bagi peserta didik usia sekolah dan usia di atas sekolah yang tidak pernah mendapat akses pendidikan karena berbagai masalah geografis, sosial, ekonomi, kultur/adat istiadat, bencana maupun kondisi

lingkungan, namun memerlukan pendidikan akademik dan kecakapan hidup secara fleksibel untuk meningkatkan taraf kehidupannya.

b. Memberikan materi akademik dan penguasaan keterampilan fungsional serta berwirausaha dengan model pembelajaran “kafetaria”, sehingga kelak peserta didik dapat melanjutkan sekolah maupun hidup mandiri.

c. Menjamin pemenuhan kebutuhan belajar bagi peserta didik usia sekolah maupun usia di atas sekolah sesuai dengan karakteristik pendidikan layanan khusus, yaitu bertujuan menyediakan akses pendidikan bagi peserta didik agar haknya untuk memperoleh pendidikan terpenuhi, tanpa kecuali, melalui akses yang adil pada program-program pembelajaran.

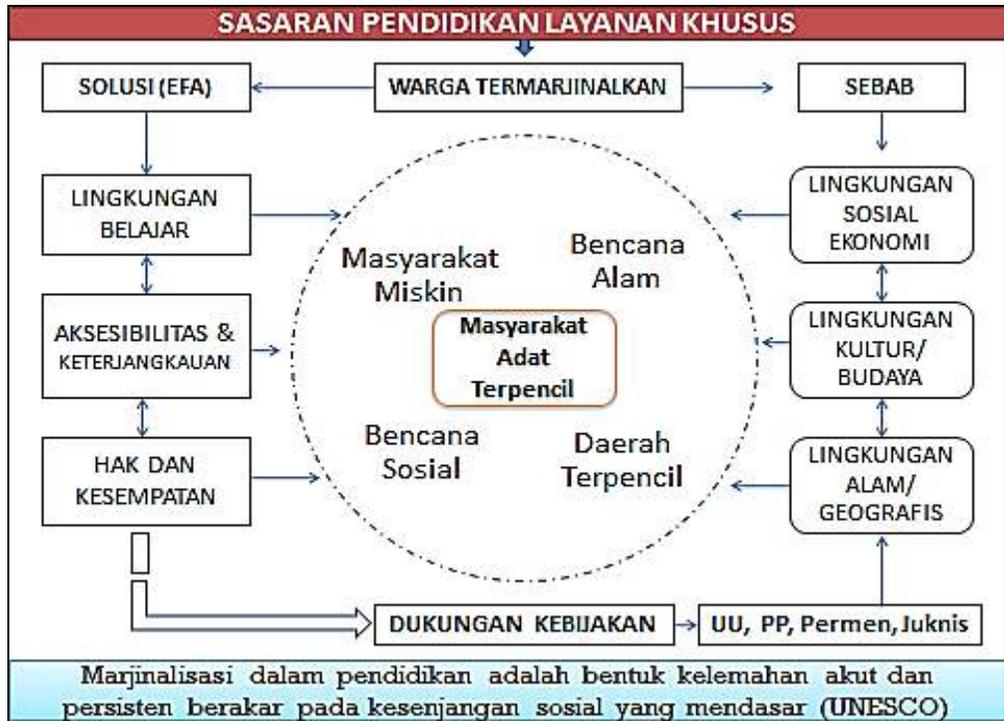
d. Dilaksanakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal, serta diselenggarakan dengan cara menyesuaikan waktu, tempat, sarana dan prasarana pembelajaran, pendidik, tenaga kependidikan, dan/atau sumber daya pembelajaran lainnya dengan kondisi kesulitan peserta didik.

e. Menghapus disparitas gender, ekonomi, sosial, kultur, dan lingkungan dalam pendidikan bagi peserta didik usia sekolah yang ingin melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi;

f. Menjamin penuntasan masalah pemberantasan buta aksara, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah yang bermutu bagi peserta didik melalui satuan pendidikan khusus PLK.

2.4.2 Sasaran

Suku Laut sebagai salah satu suku adat terpencil yang berada pesisir Kabupaten Lingga memenuhi syarat untuk mendapatkan pendidikan layanan khusus dengan sasaran sebagai berikut:



2.4.3 Target Output/Outcome

Sebagai sebuah satuan pendidikan alternatif, PLK bagi warga Suku Laut didesain dan diharapkan dapat memberikan kompetensi kepada peserta didik yang berguna bagi dirinya dan masyarakat di lingkungannya, sebagai berikut:

1. Memiliki sikap terbuka terhadap perubahan, keinginan untuk bersosialisasi, kemandirian dan kreativitas individual sesuai karakteristik dan kebutuhan peserta didik serta kondisi lingkungan dengan metode pembelajaran fleksibel.
2. Memiliki peluang untuk menggapai pendidikan, mencapai kompetensi individual semaksimal mungkin berdasarkan pengalaman nyata di lingkungan sekitarnya yang menunjang bagi peserta didik mendapatkan penghidupan yang lebih layak.
3. Memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dengan memberikan kompetensi yang sedang dibutuhkan oleh pihak luar.

4. Memiliki sejumlah kompetensi dalam usaha menunjang peserta didik dalam mendapatkan penghasilan dan bekal motivasi yang kuat untuk bisa mandiri dan tumbuh sebagai pencipta lapangan kerja di lingkungannya.
5. Memiliki kesadaran dan motivasi untuk belajar sepanjang hayat dan kesempatan bagi peserta didik yang mempunyai kemampuan dalam prestasi akademik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
6. Mampu mencari dan mendapatkan pekerjaan, serta mendirikan dan mengembangkan usaha secara mandiri untuk dirinya sebagai sumber mata pencaharian sesuai kompetensi yang dimilikinya.
7. Mampu bersaing secara sehat dalam berusaha atau bekerja sesuai dengan jenis usaha/pekerjaan yang ditekuni.
8. Mampu membangun jaringan dengan pihak-pihak yang dapat membantu peserta didik membuka peluang usaha dan berkembang sebagai pelopor keterbukaan pembangunan di lingkungannya.

2.5 Identifikasi Kategori dan Karakteristik

Pengembangan model pendidikan bagi komunitas adat Suku Laut berdasarkan kategori dan karakteristik yang ditemukan di lapangan, sebagai berikut.

**Tabel 2.1 Hasil Identifikasi Karakteristik Pendidikan
Masyarakat Suku Laut**

KATEGORI	KARAKTERISTIK
Suku Laut Bermasyarakat	<p>Pendukung:</p> <ol style="list-style-type: none">Telah berbaur dengan masyarakat pribumi dan pendatang melalui perkawinan dan interaksi sosial lainnya.Memiliki kesadaran pentingnya pendidikan bagi dirinya dan anak-anak mereka.Menyekolahkan anak mereka pada semua jenjang persekolahan sesuai kemampuan. <p>Penghambat:</p> <ol style="list-style-type: none">Kurangnya ketersediaan sekolah dekat pemukiman yang sesuai jenjang anak.Biaya sekolah yang terasa masih tinggi.Motivasi anak/orang tua untuk melanjutkan ke jenjang sekolah yang lebih tinggi masih kurang.Kurangnya peran Bidang PLS dalam memberikan layanan pendidikan non-formal.Tidak adanya sarana Taman Bacaan Masyarakat (TBM).
Suku Laut Bermukim	<p>Pendukung:</p> <ol style="list-style-type: none">Pemukiman penduduk berkelompok di pesisir pantai (atas usaha Dinsos).Memiliki SDN di dekat pemukiman penduduk.

KATEGORI	KARAKTERISTIK
	<p>3. Sebagian memiliki kesadaran pentingnya pendidikan bagi dirinya dan anak-anak mereka.</p> <p>4. Menyekolahkan anak mereka pada SDN yang tersedia.</p> <p>Penghambat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya ketersediaan guru. 2. Biaya sekolah yang terasa masih tinggi. 3. Motivasi anak/orang tua untuk sekolah masih kurang. 4. Angka putus sekolah masih tinggi (lebih banyak yang memilih jadi penebang kayu di hutan). 5. Kurangnya peran Bidang PLS dalam memberikan layanan pendidikan non-formal. 6. Tidak adanya sarana Taman Bacaan Masyarakat (TBM). 7. Tidak adanya PKBM/LSM yang menangani layanan pendidikan bagi Suku Laut.
Suku Laut Berkelompok	<p>Pendukung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemukiman penduduk berkelompok 3-5 keluarga di sepanjang pesisir pantai Kabupaten Lingga 2. Sebagian memiliki kesadaran pentingnya pendidikan bagi dirinya dan anak-anak mereka. 3. Sebagian bersedia mengikuti program Pemberantasan Buta Aksara. 4. Memiliki relawan yang berkunjung reguler. <p>Penghambat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya ketersediaan relawan. 2. Motivasi anak/orang tua untuk sekolah masih kurang. 3. Angka buta aksara sangat tinggi.

KATEGORI	KARAKTERISTIK
	<ol style="list-style-type: none"> 4. Kurangnya peran Bidang PLS dalam memberikan layanan pendidikan non-formal. 5. Tidak adanya sarana Taman Bacaan Masyarakat (TBM). 6. Kurangnya sarana perahu yang dapat menjangkau setiap kelompok. 7. Tidak ada insentif/biaya operasional bagi relawan. 8. Tidak adanya PKBM/LSM yang menangani layanan pendidikan bagi Suku Laut.
Suku Laut Berpencar	<p>Pendukung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ada keinginan Pemkab untuk mendata jumlah Suku Laut yang masih hidup berpencar. 2. Ada kebijakan untuk mendukung akses layanan pendidikan bagi Suku Laut. <p>Penghambat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penduduk berpencar (1 keluarga per perahu). 2. Kurangnya ketersediaan relawan. 3. Belum teridentifikasi jumlahnya secara pasti. 4. Rata-rata buta aksara (orang tua dan anak-anak). 5. Belum tersentuh layanan pendidikan. 6. Kurangnya peran Bidang PLS dalam memberikan layanan pendidikan non-formal. 7. Tidak adanya PKBM/LSM yang menangani layanan pendidikan bagi Suku Laut.

Berdasarkan kategori dan karakteristik sebagaimana tabel di atas, maka desain pendidikan bagi warga Suku Laut dapat digambarkan seperti skema berikut ini.

Skema Pengembangan

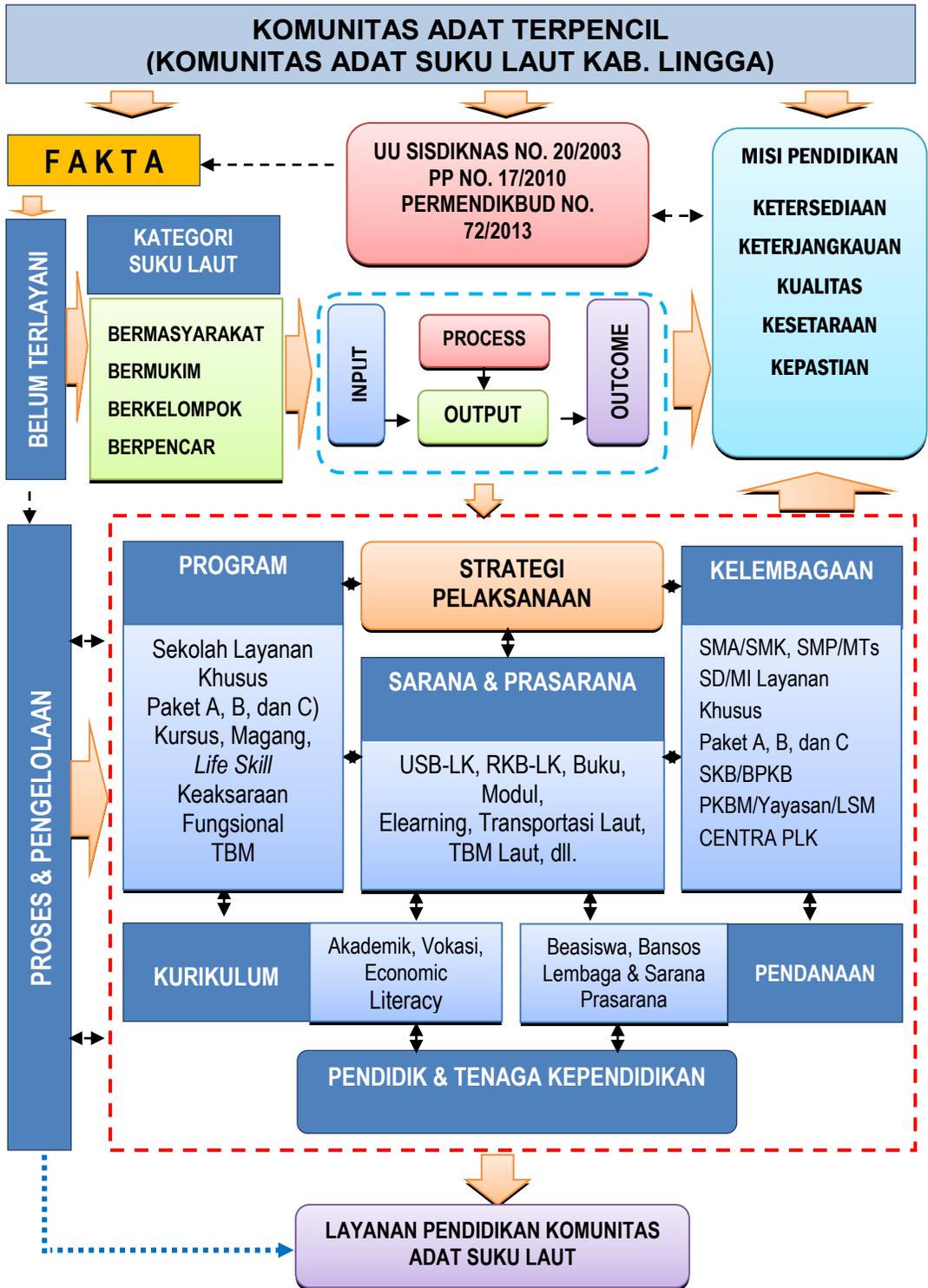


Diagram di atas menunjukkan bahwa model pengembangan PLK bagi Suku Laut berdasarkan sejumlah peraturan perundang-undangan yang bertujuan memenuhi hak asasi warga Suku Laut untuk memperoleh pendidikan dengan layanan khusus. Langkah tersebut ditempuh dengan menyediakan kebutuhan pendidikan bagi warga Suku Laut yang berbeda dari segi kondisi lingkungan, keadaan sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi untuk memperoleh pendidikan. Hal tersebut memungkinkan mereka untuk mendapatkan bekal pengetahuan agar mampu hidup mandiri dalam kehidupan bermasyarakat.

2.6 PLK Suku Laut

Satuan pendidikan pada penyelenggaraan PLK bagi warga Suku Laut berupa satuan pendidikan atau sekolah khusus, yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Sekolah khusus dilengkapi dengan pusat keterampilan hidup dan tempat kerja praktek. Sekolah memiliki standar pelayanan minimal yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan peserta didik. Pelayanan minimal tersebut berbasis keterampilan khusus dan TIK dengan prioritas pengembangan potensi lokal. Pendidikan Layanan Khusus (PLK) bagi warga Suku Laut dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah/Yayasan/LSM dan lembaga sosial kemasyarakatan lainnya. PLK dimaksud dapat berada pada jalur pendidikan formal dan informal yang memiliki jenjang mulai dari TK, SD, SMP, dan SMA sederajat. Pihak penyelenggara PLK melakukan kerja sama dengan TK, SD/MI, SMP/MTS, dan SMA/MA serta lembaga pendidikan nonformal terdekat di sekitarnya agar peserta didik PLK dapat disalurkan ke sekolah tersebut. Selain itu, satuan pendidikan bagi Suku Laut juga dapat berupa:

- a. Sekolah atau madrasah kecil;
- b. Sekolah atau madrasah terbuka;
- c. Pendidikan jarak jauh;
- d. Sekolah atau madrasah darurat;
- e. Pemandahan peserta didik ke daerah lain; dan/atau
- f. Bentuk lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan.

2.7 Penyelenggaraan

Tahap awal yang dilakukan adalah memberikan informasi kepada masyarakat Suku Laut tentang program Pendidikan Layanan Khusus sesuai dengan ketentuan daerah khusus dan/atau kondisi khusus. Pelaksanaan sosialisasi dapat dilakukan melalui media massa, pertemuan dengan tokoh, pertemuan dengan prospektif organisasi penyelenggara, pendekatan kepada masyarakat, keluarga dan anak-anak calon peserta didik daerah setempat. Selanjutnya, melakukan rekrutmen proses penjangkaran calon peserta didik, untuk mengikuti PLK. Rekrutmen dilakukan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Tahapan rekrutmen meliputi:

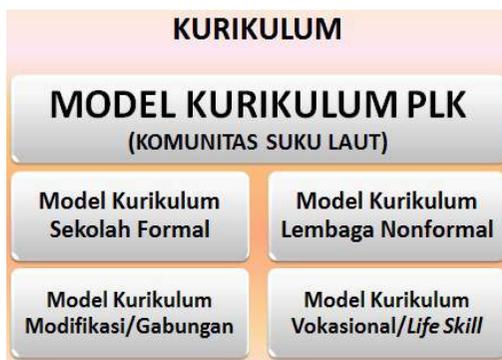
- a. Pemetaan peserta didik
- b. Kunjungan ke lokasi tinggal calon peserta didik
- c. Melakukan pendekatan kepada orang tua dan calon peserta didik daerah setempat
- d. Pendataan peserta didik
- e. Penerimaan peserta didik

Identifikasi peserta didik dari Suku Laut dilakukan dengan menggali informasi mengenai latar belakang, permasalahan dan kebutuhan pendidikan bagi peserta didik PLK. Dengan melakukan identifikasi tersebut penyelenggara PLK dapat memahami latar belakang peserta didik dan mampu mencari dan mengaplikasikan model pembelajaran yang efektif bagi peserta didik. Tujuan identifikasi peserta didik adalah sebagai:

- a. Fungsi penyaringan, yaitu untuk mengetahui kondisi peserta didik yang berkaitan dengan permasalahan kesiapan peserta didik seperti kesadaran, motivasi dan minat.
- b. Fungsi rujukan, yaitu untuk menempatkan kasus semula dari kasus pendidikan yang dapat meluas menjadi kasus kesehatan, kejiwaan dan kasus lain yang diupayakan untuk dirujuk.

- c. Fungsi perencanaan, yaitu terkait dengan proses pembelajaran sesuai kebutuhan peserta didik.
- d. Fungsi monitoring, untuk mengetahui tingkat kemajuan belajar yang dicapai peserta didik.
- e. Fungsi evaluasi program, yaitu untuk menilai sejauh mana program pembelajaran dapat dicapai.

2.8 Model Kurikulum



Model kurikulum dan proses belajar mengajar bagi warga Suku Laut disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, komposisi kurikulumnya meliputi 30% untuk bidang akademik, dan 70% untuk pendidikan keterampilan. Pelaksanaan kurikulum berdasarkan kurikulum kearifan

lokal dan pada prinsipnya kurikulum dan PBM-nya bersifat fleksibel.

- a. Kurikulum fleksibel, dengan tetap memperhatikan tujuan, isi, bahan pelajaran dan penerapannya untuk mencapai tujuan pendidikan nasional serta kekhasan, kondisi dan potensi daerah/kearifan lokal dan peserta didik.
- b. PLK dapat menggunakan KTSP sekolah formal atau non-formal yang diadopsi dan/atau telah diadaptasi (menyesuaikan) dengan kondisi lingkungan, karakteristik, dan kebutuhan peserta didik dan diberikan kurikulum *life skills*.
- c. Kurikulum mengacu pada Panduan Penyusunan KTSP yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan dengan memperhatikan fleksibilitas kekhususan sesuai dengan situasi, kondisi dan kebutuhan program peserta didik kelompok layanan.

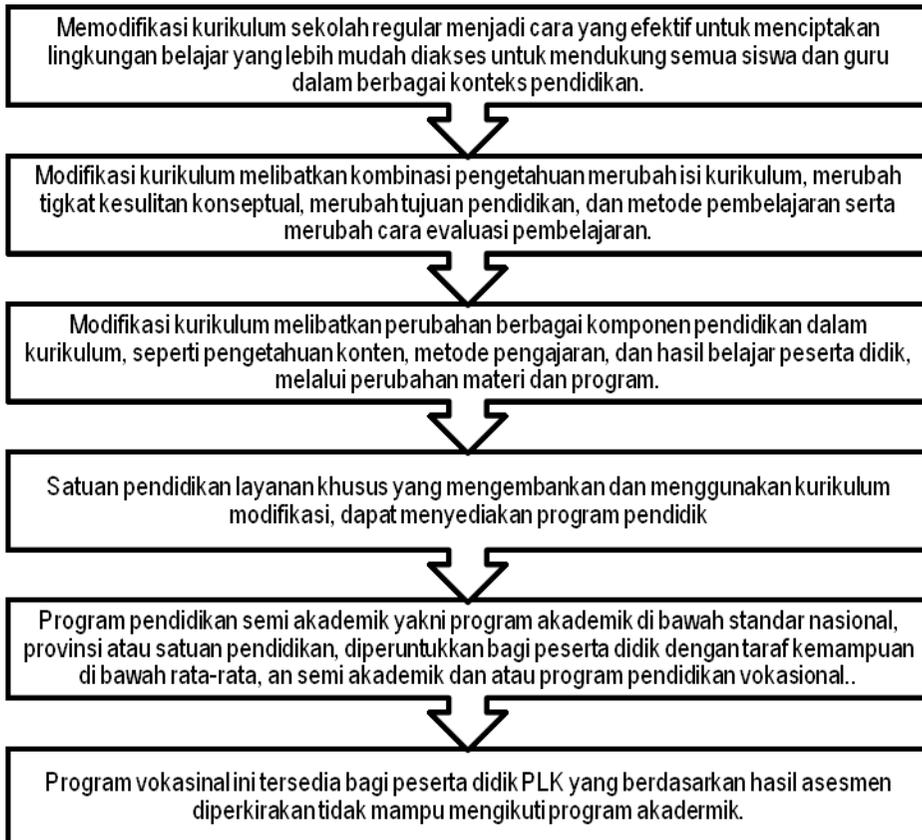
- d. Kurikulum mengacu pada Standar Kompetensi yang dapat disederhanakan/modifikasikan sesuai dengan situasi dan kondisi setempat. Kurikulum mencakup program pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan, potensi daerah, dan partisipasi aktif peserta didik.

Penerapan kurikulum PLK terdiri atas beberapa model, sesuai dengan kebutuhan, kekhususan, situasi, kondisi dan permasalahan peserta didik di daerah khusus, yang meliputi:

2.8.1 Model Kurikulum Sekolah Formal

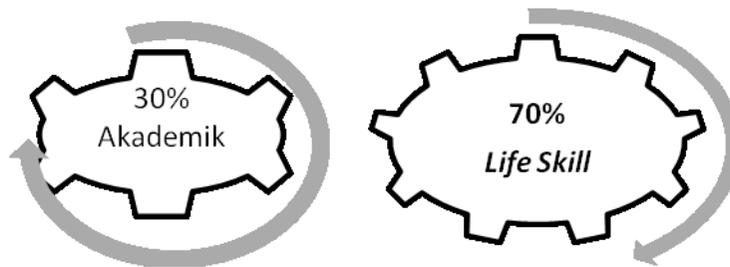
- 1) Kurikulum sekolah formal merupakan kurikulum yang diterapkan pada SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK reguler. Kurikulum PLK yang berafiliasi ke sekolah formal, bermuatan matapelajaran, muatan lokal dan pengembangan diri.
- 2) Peserta didik PLK yang mampu mengikuti ketentuan reguler, akan mengikuti ketentuan kurikulum sekolah formal sama seperti peserta didik reguler.
- 3) Program layanan khususnya lebih diarahkan kepada proses pembelajaran, sarana prasarana, waktu dan tempat yang disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik peserta didik dan daerah/lokasi SMALK yang bersangkutan.

Model Kurikulum Modifikasi



- 1) Satuan pendidikan PLK yang mengembangkan dan menggunakan kurikulum modifikasi, dapat menyediakan program pendidikan semi akademik dan/atau program pendidikan vokasional (*life skills*).
- 2) Program pendidikan semi akademik yakni program akademik di bawah standar nasional, provinsi atau satuan pendidikan, diperuntukkan bagi peserta didik PLK dengan taraf kemampuan intelektual di bawah rata-rata.
- 3) Materi akademik pada kurikulum menjadi lebih fleksibel dengan menetapkan standar isi di bawah tuntutan standar nasional, provinsi maupun standar satuan pendidikan.
- 4) Program pendidikan vokasional ditujukan agar peserta didik mempunyai kompetensi untuk bekerja setelah mereka tamat.

- 5) Program vokasional ini tersedia bagi peserta didik PLK yang berdasarkan hasil asesmen diperkirakan tidak mampu mengikuti program akademik.
- 6) Kurikulum terdiri dari materi akademik/semi akademik dan materi vokasional, dikembangkan dari standar-standar nasional, dengan proporsi 30% akademik/semi akademik dan 70% vokasional. Jenis keterampilan yang disediakan mempertimbangkan bakat, minat dan sumberdaya yang dimiliki sekolah.



Catatan:

1. Materi akademik pada kurikulum menjadi lebih fleksibel dengan menetapkan standar isi di bawah tuntutan standar nasional, provinsi maupun standar satuan pendidikan.
2. Program pendidikan vokasional ditujukan agar peserta didik mempunyai kompetensi untuk bekerja setelah mereka tamat.

Sarana dan prasarana pendidikan bagi warga Suku Laut juga bersifat fleksibel. Gedung (tempat PBM), alat pendidikan, infrastruktur (WC/kamar mandi), disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi yang dimilikinya. Tenaga pengajar layanan pendidikan khusus bagi warga Suku Laut adalah tenaga relawan yang memiliki rasa peduli yang sangat tinggi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemerintah (Pusat dan Daerah) dan masyarakat (LSM/PKBM dan sejenisnya) berkewajiban untuk melakukan pembinaan. Sumber biaya/dana satuan pendidikan Layanan Khusus dapat berasal dari Donatur Perorangan, Perusahaan, Masyarakat Peduli Pendidikan, Lembaga-Lembaga Peduli Pendidikan, dan Pemerintah Pusat dan Daerah.

2.8.2 Program Mendesak

Berdasarkan hasil kunjungan lapangan, FGD, dan wawancara mendalam, pengembangan model pendidikan bagi Suku Laut sebaiknya disesuaikan dengan

karakteristik kehidupan nomaden (laut) mereka. Untuk itu, terdapat beberapa alternatif layanan pendidikan yang dapat membantu dan sangat bermanfaat bagi Suku Laut, sebagai berikut.

2.8.3 Program Pemberantasan Buta Aksara

Masalah buta huruf atau buta aksara di kalangan masyarakat Suku Laut sangat memprihatinkan, terutama bagi mereka yang masih hidup berpencar di pesisir Kabupaten Lingga. Hal tersebut terkait dengan pola hidup yang berpindah-pindah dengan menggunakan perahu mengakibatkan kemiskinan, keterbelakangan, kebodohan dan ketidakberdayaan. Kesulitan mengakses sumber-sumber belajar menjadikan sebagian besar warga Suku Laut tertutup dengan perkembangan pembangunan dan tidak mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Untuk itu, harus disadari bahwa pemberantasan buta huruf merupakan tanggung jawab bersama. Kondisi yang demikian menuntut terciptanya terobosan dalam hal ini pemerintah, lembaga pendidikan, LSM, dan masyarakat untuk membantu warga Suku Laut agar memiliki kemauan keluar dari lingkaran buta huruf yang menyengsarakan.

Pemberantasan buta aksara bagi warga Suku Laut penting untuk segera dilaksanakan dengan perancangan program yang tepat. Program biasanya dikembangkan untuk menyediakan pelayanan sosial yang secara langsung menyentuh masyarakat sebagai sasaran perubahan.

Strategi ini menekankan pada sosio kultural berangkat dari kondisi warga belajar dengan sejumlah latar belakang. Latar belakang etnis, pekerjaan atau mata pencaharian, agama, dan geografis menjadi titik pijak dalam pelaksanaan pembelajaran kepada masyarakat. Pembejalaran kepada penyandang tributa dikemas sedemikian rupa agar warga belajar merasa senang, tidak dipaksa. Rasa senang warga belajar diungkit dari beberapa aspek.

Dalam kasus pemberantasan buta aksara ini, perancangan program dapat dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Merumuskan nama program atau intervensi. Nama program bisa mengacu pada tujuan umum (*goal*) program yang berfungsi memberikan fokus pada rencana atau usaha perubahan, serta pedoman bagi maksud atau alasan-alasan mengapa program Pengembangan Masyarakat perlu dilakukan.
- b. Menyatakan tujuan-tujuan hasil. Menjelaskan hasil-hasil yang ingin dicapai sebuah program secara terukur dalam kurun waktu tertentu dan dengan indikator atau ukuran yang ditetapkan. Misal: menetapkan kerangka waktu,

- mendefinisikan populasi sasaran, merumuskan hasil yang ingin dicapai, menyatakan indikator atau kriteria untuk mengukur pencapaian hasil.
- c. Menyatakan tujuan-tujuan proses. Misal: menetapkan kerangka waktu bagi proses pencapaian tujuan, mendefinisikan populasi sasaran, merumuskan hasil dari proses pencapaian tujuan, menyatakan indikator atau kriteria yang dapat dijadikan dokumen.
 - d. Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Membuat format kegiatan-kegiatan untuk memudahkan pemantauan (*monitoring*), merumuskan kegiatan atau tugas yang harus selesai dilakukan untuk mencapai tujuan.
 - e. Mengembangkan rencana aksi. Merancang manajemen logistik, memilih dan melatih para partisipan.
 - f. Memonitor proses kegiatan. Memonitor kegiatan-kegiatan teknis, memonitor kegiatan-kegiatan interpersonal.
 - g. Mengevaluasi hasil intervensi. Membuat laporan-laporan evaluasi secara periodik berdasarkan hasil monitoring.

2.8.4 Taman Bacaan Masyarakat

Taman Bacaan Masyarakat (TBM) adalah salah satu media selain perpustakaan untuk mengembangkan minat baca masyarakat. TBM adalah untuk melayani kepentingan penduduk yang tinggal di sekitarnya. Mereka terdiri atas semua lapisan masyarakat tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, agama, adat istiadat, tingkat pendidikan, umur dan lain sebagainya. TBM mencakup tanggung jawab, wewenang, dan hak masyarakat setempat dalam membangunnya, mengelola, dan mengembangkannya. Dalam hal ini perlu dikembangkan rasa untuk ikut memiliki, ikut bertanggung jawab dan ikut memeliharanya.

Penyediaan Taman Bacaan Masyarakat bagi warga Suku Laut dapat menjadi sarana sumber belajar yang dapat diakses setiap saat. Dalam konteks ini, TBM bertujuan dan berfungsi sebagai: 1) memberikan kesempatan bagi umum untuk membaca bahan pustaka yang dapat membantu meningkatkan mereka ke arah kehidupan yang lebih baik, 2) menyediakan sumber informasi yang cepat, tepat dan murah bagi masyarakat, terutama mengenai topik yang berguna bagi mereka yang sedang hangat dalam kalangan masyarakat; 3) membantu warga untuk mengembangkan kemampuan yang dimilikinya sehingga yang bersangkutan akan bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya, sejauh kemampuan tersebut dapat

dikembangkan dengan bantuan bahan pustaka, 4) bertindak selaku *agen cultural*, artinya TBM pusat utama kehidupan budaya bagi masyarakat sekitarnya.

2.8.5 Program Pendidikan Kesetaraan

Pada saat FGD dengan para pemangku kepentingan pendidikan di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Lingga, diperoleh informasi bahwa Program Pendidikan Luar Sekolah (PLS) belum terlaksana dengan baik. Informasi tersebut patut disayangkan mengingat program PLS diyakini dapat menjadi solusi yang tepat bagi penanganan masalah pendidikan bagi warga Suku Laut. Program PLS berada dalam lingkup pendidikan nonformal, mencakup pendidikan kesetaraan yang dapat menjadi jalur alternatif bagi masyarakat yang tidak memperoleh kesempatan menempuh jalur pendidikan formal.¹⁹ Pendidikan Kesetaraan meliputi kelompok belajar (kejar) Program Paket A setara SD/MI, Program Paket B setara SMP/MTs, dan Program Paket C setara SMA/MA yang dapat diselenggarakan melalui Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), atau satuan sejenis lainnya.

Penyelenggaraan program ini terutama ditujukan bagi masyarakat putus sekolah karena keterbatasan ekonomi, masyarakat yang bertempat tinggal di daerah-daerah khusus, seperti daerah perbatasan, daerah bencana, dan daerah yang terisolir yang belum memiliki fasilitas pendidikan yang memadai. Pendidikan kesetaraan sangat bermanfaat; memiliki peran strategis dalam rangka pemberian bekal sikap, pengetahuan, dan keterampilan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat; mendukung dan mensukseskan program pendidikan Wajib Belajar 9 Tahun; dan sebagai salah satu upaya yang ditempuh untuk memperluas akses pendidikan guna mendukung pendidikan untuk semua (*education for all*) dan pendidikan sepanjang hayat (*life long learning*).

Dalam konteks warga Suku Laut yang bermukim di pesisir laut Kabupaten Lingga, tentu tidak mudah, terutama disebabkan oleh karakteristik budaya dan kondisi geografis serta ekonomi masyarakatnya. Untuk mengajak warga Suku Laut mengikuti program belajar paket tidaklah mudah; para pendidik (guru/pamong/tutor/relawan) harus bekerja keras untuk memperoleh para calon warga belajar, terutama warga Suku Laut yang masih hidup berpencar. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan pendekatan, memberikan memotivasi, dan menjelaskan akan pentingnya pendidikan. Untuk itu para

¹⁹ UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan mengganti.

pendidik perlu memiliki pemahaman dan kemampuan sosio-kultural yang dibutuhkan dalam berinteraksi dengan sasaran calon warga belajar/peserta didik. Langkah kedua terkait dengan pemilihan model dan desain pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik kehidupan warga Suku Laut yang masih bersifat nomaden. Program pendidikan kesetaraan Paket A, B, dan C yang diterapkan harus sangat fleksibel, tidak terbatas pada ruang dan waktu, peserta didik dapat melakukan pembelajaran di mana saja dan kapan saja, tanpa harus menghambat urusan keluarga dan ekonominya. Langkah selanjutnya adalah melakukan pengembangan peningkatan akses dan pemerataan melalui pembukaan kelompok-kelompok belajar baru pada sasaran yang terfokus, dan perluasan akses pendidikan kesetaraan melalui pemberdayaan masyarakat di sekitarnya. Pelaksanaan Program Pendidikan Kesetaraan bagi warga Suku Laut sebaiknya mempertimbangkan pula kondisi dan karakteristik warga belajar; ketersediaan tutor/guru/relawan; termasuk sarana dan prasarana. Pertimbangan terkait warga belajar, antara lain: a) lokasi tempat tinggal warga belajar berada di wilayah perairan, saling berjauhan sehingga jumlah anggota kelompok warga belajar sebaiknya fleksibel; b) latar belakang sosial ekonomi warga belajar lemah sehingga frekuensi kehadirannya sangat rendah; c) warga belajar menjadi pencari nafkah keluarga, mereka hanya belajar kalau waktu mengizinkan; d) motivasi belajar rendah, mereka berpendapat tanpa belajar pun mereka sudah mendapatkan uang. Untuk itu, model pembelajaran yang didesain untuk warga belajar bersifat mandiri, mempunyai kebebasan untuk belajar tanpa harus menghadiri pertemuan atau kelas pelajaran yang diberikan tutor/relawan.²⁰ Kemandirian belajar dalam konteks ini dapat diasumsikan sebagai berikut:

- a. Peserta didik mempunyai kesempatan untuk ikut menentukan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai sesuai dengan kondisi dan kebutuhan belajarnya.
- b. Peserta didik boleh ikut menentukan bahan belajar yang ingin dipelajarinya dan cara mempelajarinya.
- c. Peserta didik mempunyai kebebasan untuk belajar sesuai dengan kecepatannya sendiri.
- d. Peserta didik dapat ikut menentukan cara evaluasi yang akan digunakan untuk menilai kemajuan belajarnya.

²⁰ Menurut Wedemeyer seperti yang disajikan oleh Keegan (1983), peserta didik yang belajar secara mandiri dapat mempelajari pokok bahasan atau topik pelajaran tertentu dengan membaca buku atau melihat dan mendengarkan program media pandang-dengar (*audio visual*) tanpa bantuan atau dengan bantuan terbatas dari orang lain.

Tutor/relawan yang menjadi pendidik dalam program kesetaraan bagi warga Suku Laut harus memiliki keikhlasan yang tinggi mengingat karakteristik masyarakatnya begitu kompleks disertai berbagai macam tantangan yang tidak bisa dibilang mudah. Untuk itu, tugas tutor/relawan bukanlah mengajar tetapi membimbing warga belajar dalam memahami materi pelajaran, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Tutor/relawan harus memahami tujuan pendidikan kesetaraan dalam konteks pelaksanaan pendidikan khusus bagi warga Suku Laut yang memiliki latar belakang keguruan. Jika tutor/relawan yang ideal sulit ditemukan, maka harus ada usaha peningkatan kemampuan Tutor dalam bentuk *upgrading* melalui pelatihan singkat. Jika prasyarat itu pun sulit terpenuhi karena berbagai kendala teknis dan non-teknis, maka tutor/relawan dianjurkan untuk mengidentifikasi dan mempelajari kebutuhan warga belajar.

Seorang Tutor untuk mampu melaksanakan tugasnya dengan baik seharusnya dilengkapi dengan kebiasaan seperti: a) kemampuan mengidentifikasi kebutuhan belajar; b) kemampuan menyusun program pembelajaran yang berorientasi pada tujuan yang diinginkan warga belajar; c) kemampuan berkomunikasi agar mampu menggunakan berbagai cara dalam pembelajaran; d) kemampuan menjalankan program dalam arti kemampuan mengorganisir program; e) kemampuan menilai hasil program. Dengan demikian Tutor harus memahami standar yang harus dicapai pada setiap kurun waktu; dan, f) kemampuan menggunakan hasil penilaian dalam usaha memperbaiki program di masa mendatang.

Pertimbangan terkait sarana dan prasarana belajar juga diupayakan sangat fleksible dan menjadi penyebab hambatan dalam belajar, antara lain: a) memanfaatkan gedung sekolah terdekat, balai desa; meminjam tempat tinggal tokoh masyarakat atau rumah warga belajar yang luas, *pompong* (perahu) warga yang relatif dapat menampung sejumlah peserta didik, dan tempat pertemuan lainnya. Sarana belajar sebagai media pembelajaran yang digunakan untuk program kesetaraan warga Suku Laut dapat dipertimbangkan, misalnya: (a) penyediaan sejumlah modul/buku-buku yang relevan agar peserta didik dapat melaksanakan proses belajar mandiri; (b) jenis dan jumlah modul/buku disesuaikan dengan karakteristik dan dapat menambah wawasan warga belajar; dan (c) memanfaatkan sarana belajar lokal atau sumber belajar apapun yang tersedia di lokasi kegiatan.

Untuk memberikan semangat (motivasi) kepada warga belajar agar tetap senang belajar, maka pengelola program pendidikan kesetaraan diharapkan juga

mendirikan Taman Bacaan Masyarakat (TBM), yaitu merupakan sarana belajar bagi masyarakat untuk memperoleh informasi dan mengembangkan pengetahuan guna memenuhi minat dan kebutuhan belajarnya yang bersumber dari bahan bacaan dan bahan pustaka lainnya. Ini semacam perpustakaan mini dan tersebar untuk menjangkau masyarakat yang jauh dari layanan perpustakaan. Ada dua sasaran prioritas utama sasaran pendirian taman bacaan masyarakat, pertama untuk peningkatan minat baca masyarakat dan kedua untuk memelihara kemampuan keaksaraan masyarakat. Di samping itu, diharapkan keberadaan TBM bisa menjadi tempat berkumpul warga masyarakat untuk sekedar ngobrol mempererat silaturahmi tukar informasi untuk memperkaya wawasan. Dengan demikian TBM pun bisa berfungsi sebagai ruang publik untuk melakukan sosialisasi diri, termasuk mempromosikan/ mengenalkan program-program pendidikan nonformal kepada masyarakat.²¹

Pertimbangan lainnya adalah terkait dengan evaluasi atau penilaian hasil belajar warga belajar Paket A, B dan C. Penilaian dapat dilaksanakan dalam bentuk evaluasi proses pembelajaran modul, evaluasi sekelompok modul dan penilaian hasil belajar tahap akhir terutama materi pelajaran yang diujikan dalam Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) meliputi PPKn, Bahasa Indonesia, IPA, IPS dan Matematika untuk Paket A dan kelima bidang studi tersebut ditambah Bahasa Inggris untuk Paket B. Pelaksanaan UNPK juga sebaiknya bersifat fleksibel, ditunjang oleh kebijakan khusus dengan mengacu pada tujuan pendidikan layanan khusus bagi warga Suku Laut.

²¹ [https://www.academia.edu/13063393/Makalah Pendidikan Kesetaraan Program Kejar Paket A dan Paket B](https://www.academia.edu/13063393/Makalah_Pendidikan_Kesetaraan_Program_Kejar_Paket_A_dan_Paket_B)

BAB III

PELAYANAN PENDIDIKAN BAGI KOMUNITAS ADAT SUKU BADUY DI LEBAK BANTEN

3.1 Kebudayaan Suku Baduy

3.2 Pelayanan Pendidikan pada Komunitas Suku Baduy

Berdasarkan hasil studi lapangan diperoleh informasi bahwa pemerintah Kabupaten Lebak dan masyarakat telah berupaya untuk menyediakan dan memberikan layanan pendidikan di sekitar Desa Kanekes yang dekat dan berbatasan dengan wilayah komunitas adat Suku Baduy. Pemberian layanan pendidikan kepada masyarakat Baduy tersebut diselenggarakan melalui pendidikan formal dan nonformal. Layanan pendidikan nonformal dinilai oleh masyarakat lebih sesuai dan diminati oleh masyarakat Baduy Luar dibanding dengan pendidikan formal, oleh karena penyelenggaraannya dapat disesuaikan dengan kesempatan (waktu), ketersediaan tempat dan tenaga serta konteks budaya masyarakat Baduy. Pelayanan pendidikan nonformal yang telah dilaksanakan bagi masyarakat Baduy yaitu (1) program pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF), sekaligus sebagai pendidikan dan pelatihan keterampilan dasar untuk mengembangkan kecakapan hidup dan kewirausahaan; dan (2) program pendidikan kesetaraan; sedangkan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah telah disediakan untuk masyarakat sekitar Desa Kanekes.

Penerimaan pelayanan pendidikan oleh masyarakat Baduy Luar tersebut tidak mudah dilakukan. Baru sekitar tahun 1997 oleh Sarpin bersama beberapa teman dari komunitas adat Baduy Luar lainnya memulainya sebagai pionir, yakni ikut berperan aktif dalam memberantas buta huruf dan mengembangkan pendidikan lainnya untuk komunitas adat Baduy. Mereka bekerjasama secara berhati-hati dan tersembunyi agar lolos dari aturan adat yang melarang anak-anak Baduy bersekolah. Peran aktif tokoh-tokoh Baduy Luar, masyarakat sekitar Kanekes, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) setahap demi setahap mengubah pola pikir dan mendorong motivasi masyarakat adat Suku Baduy Luar untuk memperoleh pendidikan yang layak, tidak hanya melalui pendidikan nonformal semata, melainkan juga sudah mulai menempuh pendidikan melalui sekolah

formal sampai pendidikan menengah dan tinggi. Gambaran jenis pelayanan pendidikan bagi masyarakat Baduy dideskripsikan pada uraian berikut.

3.2.1 Pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF)

Program pendidikan Keaksaraan Fungsional dicanangkan untuk tujuan membelajarkan warga belajar kelompok usia produktif umur 10-44 tahun agar mampu membaca, menulis, berhitung, dan berbahasa Indonesia dengan baik dan benar sebagai dasar untuk meningkatkan usaha dan taraf kehidupannya. Pendidikan keaksaraan fungsional juga diarahkan untuk dapat meningkatkan kapasitas berpikir dan pengembangan potensi pribadi secara optimal agar mampu berperan dalam dinamika kehidupan serta memberikan kontribusi bagi perkembangan sosial budaya. Secara spesifik, kegiatan belajar pendidikan ini terintegrasi dengan keterampilan usaha berdasarkan kebutuhan dan potensi warga belajar yang diarahkan pada peningkatan keberdayaan ekonomi melalui pemanfaatan keunggulan potensi lingkungannya. Penguasaan keterampilan dasar calistung ini dibutuhkan oleh warga belajar dari Suku Baduy Luar, terutama agar mereka dapat memecahkan persoalannya sehari-hari, seperti menghitung dan mencatat hasil pertanian, hasil hutan, hasil kerajinan tenun dan jual-beli, sehingga dapat terhindar dari penipuan yang sering terjadi dalam transaksi dengan masyarakat luar. Bahkan kemampuannya dapat dipakai untuk pengelolaan administrasi perdagangan, pemerintahan, seperti menulis pesanan barang, kuitansi, mengisi formulir, membaca petunjuk, menulis surat; atau lebih jauh lagi untuk berkomunikasi dan transaksi berdagang hasil produksi warga Baduy.

Masyarakat adat Suku Baduy di Kecamatan Leuwidamar telah mulai mengikuti program keaksaraan fungsional yang dirintis sejak sekitar tahun 1997, diawali dengan program pemberantasan buta aksara. Hingga tahun 2016 ini, animo masyarakat Baduy Luar untuk mengikuti pendidikan keaksaraan fungsional cukup besar. Menurut penjelasan kepala UPT Pendidikan Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, peserta pendidikan keaksaraan untuk masyarakat Baduy Luar saat ini tercatat ada 15 kelompok belajar yang masing-masing kelompok belajar ada lebih kurang 10 warga belajar, sehingga seluruhnya berjumlah 150 warga Belajar. Kelompok Belajar ini tersebar di beberapa kampung di Desa Kanekes yang ditinggali oleh warga Baduy Luar. Target peserta pendidikan kesetaraan ini adalah mereka yang berusia 15 tahun ke atas dan belum bisa membaca dan menulis, namun tidak menutup kemungkinan

untuk melibatkan warga berusia di bawah 15 tahun, jika mereka belum pernah bersekolah, seperti halnya banyak terdapat pada warga suku Baduy.

Pelayanan pendidikan KF tersebut dikelola oleh dua Pusat Kegiatan Belajar Mandiri (PKBM) yang berlokasi di dusun dekat Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar, yakni PKBM Kencana Ungu yang telah aktif sejak tahun 2007, dan PKBM Harapan Mulia yang berdiri pada tahun 2010. Jadwal waktu belajar pendidikan keaksaraan dilaksanakan pada setiap hari Sabtu dan Minggu dimulai pukul 13.00 selama 2 jam pembelajaran. Di luar jadwal pembelajaran di PKBM tersebut, dilakukan pula kegiatan belajar di komunitas Baduy Luar, di beberapa kampung yang tersebar di desa Kanekes dengan membentuk kelompok-kelompok belajar mandiri. Kelompok-kelompok belajar tersebut dipimpin oleh tutor sebaya. Tutor sebaya yang ditunjuk harus memenuhi syarat, antara lain: (1) seorang warga yang berasal dari orang Baduy Luar di kampung Kanekes; (2) telah menguasai keaksaraan yang lebih baik dari pada warga lainnya atau oleh mereka yang telah mengikuti program pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C; (3) dapat mengatur waktu, tempat dan menjaga diri dengan aturan adat; serta (4) memiliki bahan dan tata cara pembelajaran seperti tutor di PKBM. Kegiatan kelompok belajar di kampung-kampung Kanekes ini lebih diutamakan oleh warga belajar dibanding dengan kunjungan warga ke PKBM. Hal ini disebabkan jarak dari pemukiman di kampung Kanekes menuju PKBM cukup jauh, lebih dari 10 km. Oleh karenanya, absensi pembelajaran di PKBM relatif tinggi; dan untuk pengganti aktivitasnya di PKBM maka warga diarahkan aktif di kelompok-kelompok belajar di kampungnya dengan bimbingan tutor sebaya untuk pendalaman materi belajar KF.

Kegiatan kelompok belajar di lingkungan komunitas adat Baduy Luar ini tetap diselenggarakan secara terbatas dan tidak terbuka untuk menjaga agar tidak melanggar norma adat. Kendati ketentuan adat Baduy Luar pada saat ini “tidak melarang dan tidak menyuruh” untuk warganya sekolah, namun kegiatan kelompok belajar tetap dilaksanakan secara berhati-hati dengan menjaga diri agar tidak mendapat teguran dari tetua adat. Kondisi ini merupakan perkembangan perubahan sikap lembaga adat yang dalam waktu lama secara keras melarang anak-anak Baduy bersekolah, berangsur secara perlahan tetapi pasti, memberikan peluang dan sikap yang positif terhadap warganya untuk memperoleh pendidikan dari luar komunitas adatnya.

Perkembangan pendidikan keaksaraan yang telah dicapai oleh masyarakat Baduy pada saat ini, tidak terlepas dari peran beberapa tokoh Baduy Luar yang menjadi perintis dan pembuka “peradaban” baru dalam hal baca-tulis. Salah satu perintis perubahan tersebut antara lain adalah warga Baduy Luar yang namanya Sarpin. Pada tahun 1997, Sarpin yang telah memiliki kemampuan dasar baca tulis sekedarnya yang dipelajarinya secara otodidak, mencoba untuk mengamalkan ilmu yang dimilikinya kepada warga sekitar. Awalnya Sarpin hanya mengajarkan kedua putranya dan saudara terdekatnya untuk mengenal huruf dan berhitung. Pengajarannya tidak bisa secara terang-terangan, memanfaatkan tulisan dan angka dari kertas-kertas pembungkus atau kantong kertas dan plastik barang belanjaan, dipadukan dengan konteks lingkungan rumah dan alam sekitarnya. Pendekatan tersembunyi tersebut, dilakukan karena terpaku pada norma adat, yang mengatur bahwa: “sekolah merupakan salah satu hal yang dilarang dalam adat karena sekolah formal bisa merusak adat”. Cara ini terus dilakukan bersama dengan beberapa orang Baduy lain yang memiliki dasar pemikiran yang sama tentang manfaat pendidikan bagi perbaikan masyarakat Baduy. Mereka yakin ada banyak manfaat pendidikan bagi kehidupan masyarakat Baduy, baik dalam hal perluasan wawasan, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, maupun untuk bekal pembelaan terhadap eksistensi Suku Baduy.

Gayung bersambut, seiring adanya perintisan kegiatan Calistung oleh beberapa tokoh Baduy Luar, pada tahun 2007 pemerintah mencanangkan Program Keaksaraan Fungsional sekaligus untuk penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun. Salah satu kabupaten yang menjadi prioritas adalah Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Menurut Fransisca (2010) Kabupaten Lebak dipilih menjadi target penuntasan buta aksara karena jumlah penduduk buta huruf yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan kabupaten lain di Provinsi Banten. Hal ini dikarenakan di Kabupaten Lebak terdapat Suku Baduy yang mendiami Kecamatan Leuwidamar dengan jumlahnya sekitar sembilan ribu jiwa, hampir semua warganya buta huruf. Pelaksanaan pendidikan KF pada masyarakat Suku Baduy memanfaatkan tersebut tutor dari komunitas Baduy sendiri.

Pada saat itu pesertanya cukup banyak, karena secara telaten warga belajar direkrut oleh Sarpin dan teman-temannya dari rumah ke rumah secara hati-hati agar tidak bergesekan dan terhindar dari aturan adat. Jumlah peserta program sampai sebanyak 250 orang dibagi ke dalam 25 kelompok belajar, sehingga

setiap tutor memegang sepuluh peserta didik. Target peserta program kesetaraan ini adalah mereka yang berusia 15 tahun ke atas dan belum bisa membaca dan menulis. Kendati demikian Sarpin, juga berinisiatif menyertakan anak-anak di bawah usia 15 tahun yang memang ingin belajar membaca dan menulis. Sarpin juga membangun komunitas membaca, menulis dan berhitung melalui pendekatan personal dengan cara mendatangi rumah-rumah warga yang ingin belajar. Sarpin sendiri memegang beberapa kelompok belajar dengan rentang usia antara 10 tahun hingga 40 tahun. Komunitas belajar Calistung ini menjadi cikal bakal terjadinya kegiatan kelompok belajar tutor sebaya di dusun-dusun Desa Kanekes dalam melaksanakan pendidikan KF. Tradisi ini dilanjutkan dalam pengelolaan pendidikan keaksaraan saat ini dan juga untuk pengembangan program kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C yang diasuh oleh beberapa warga Baduy Luar sebagai Tutor. Berkat kemampuannya menjadi tutor KF dan sebagai tokoh penggerak pemberantasan buta huruf, Sarpin diangkat menjadi tutor tingkat nasional yang menginspirasi tutor-tutor lain dari berbagai daerah di Indonesia.

Pada awalnya, masyarakat Baduy masih memegang teguh adat dengan berharap warga Baduy sendiri yang menjadi tenaga pengajar pada program KF dan melarang orang luar mengajar orang Baduy. Untuk menyasati hal tersebut tersebut, PKBM merekrut tenaga tutor dari masyarakat Baduy Luar, seperti Sarpin, Rouf dan lainnya yang telah mulai melek huruf untuk menjadi tutor yang mengajarkan warga Baduy bisa membaca dan menulis. Pada saat ini, tutor KF selain dari kalangan warga Baduy Luar juga berasal dari masyarakat umum di luar Baduy, terutama pembelajaran yang dilaksanakan di PKBM.

Pendayagunaan keterampilan calistung ini menjadi strategis karena dapat membuka wawasan masyarakat Baduy terhadap kemajuan dunia luar dan tantangannya terhadap semakin terbatasnya tanah adat untuk menopang sumber kehidupan Suku Baduy. Oleh karena itu, kendati kegiatan seperti membaca, menulis, dan berhitung “tidak dilarang maupun dianjurkan” oleh adat namun melalui layanan pendidikan keaksaraan fungsional ini banyak warga Baduy yang sudah mampu memberdayakan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung untuk membantu kehidupan sehari-hari dan meningkatkan kehidupan ekonominya. Oleh sebab itu, Program KF ini selain mengajarkan komunitas masyarakat Baduy untuk mengenal keaksaraan dasar (Calistung), juga mengajarkan kemampuan kecakapan hidup (*life skill*). Kecakapan hidup yang

diajarkan adalah keterampilan untuk menunjang kehidupan warga Baduy seperti: menenun dengan mengajarkan tambahan pembelajaran motif tenun yang bervariasi, membuat dan mengemas gula aren, pengelolaan perdagangan, kesehatan dan kebersihan, dan lainnya. Pendidikan kecakapan hidup ini merupakan salah satu daya tarik tersendiri bagi masyarakat Baduy dan menjadi salah satu alasan kenapa program ini tidak dilarang oleh tetua adat. Hal ini menunjukkan bahwa program keaksaraan fungsional mampu merubah perilaku dan kehidupan komunitas Suku Baduy.

Menurut Jaro Cibeo, terdapat tiga alasan mengapa sekolah formal dilarang oleh adat. Alasan pertama yaitu orang Baduy tugasnya adalah mengurus wiwitan, menjaga dan melaksanakan adat. Pendidikan adat sudah dilaksanakan sejak lahir sampai mati secara bertahap oleh komunitas adat terkait dengan keagamaan, penguasaan alam, nilai-nilai kemanusiaan dan segala sesuatu tentang kehidupan; sedangkan sekolah formal itu untuk mengurus negara, biarkan orang luar yang mengurus negara. Alasan kedua adalah ada anggapan di kalangan masyarakat Baduy jika mereka sekolah, maka nantinya akan menjadi pintar, dan jika sudah pintar nanti akan berbuat semaunya yang bertentangan dan meninggalkan adat, bahkan keluar dari komunitas adat. Selanjutnya, dalam tata kehidupan dan struktur kepemimpinan adat tidak diperlukan lulusan dari sekolah formal, karena semua kompetensi untuk menduduki tampuk kepemimpinan komunitas adat Baduy hanya dapat dipenuhi orang Baduy yang memahami dan menghayati adat melalui pengajaran secara adat. Pendidikan sekolah dinilai hanya menjadi sarana untuk mengajarkan keduniawian yang materil secara ekonomi; dan akan menjadi lupa akan nilai kesederhanaan, kebahagiaan, kejujuran yang menjadi akar kehidupan adat masyarakat Baduy. Oleh sebab itu, penguasaan Calistung dan kemampuan keterampilan yang diperoleh dari luar yang dicapai oleh masyarakat Baduy luar saat ini merupakan kemajuan yang sangat berarti (signifikan).

3.2.2 Pendidikan Kesetaraan

Pendidikan kesetaraan ini merupakan program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakup program Paket A, Paket B, dan Paket C. Pelayanan pendidikan kesetaraan untuk masyarakat Baduy Luar telah berlangsung cukup lama. Berdasarkan catatan diketahui bahwa Program Pendidikan Kesetaraan mulai dirintis sejak tahun 2007 oleh PKBM Kencana Ungu dan disusul pada tahun 2010 oleh PKBM Harapan Mulia, PKBM Dian Harapan yang mulai

mencanangkan program Kesetaraan (Paket A dan Paket B) sekaligus dengan program KF.

Pada tahun 2007 PKBM Kencana Ungu telah mulai menyelenggarakan pendidikan kesetaraan untuk 4 (empat) desa/komunitas binaan, salah satunya memfokuskan pada komunitas binaan bagi warga Baduy Desa Kanekes. Program pendidikan kesetaraan bagi masyarakat Baduy Luar tersebut secara bertahap dapat diwujudkan karena dukungan sumberdaya dari tokoh masyarakat berasal dari Rangkasbitung yang peduli terhadap suku Baduy, dan secara khusus dibantu oleh Sarpin dan H. Kasmin sebagai pengelola dan sebagai warga belajar yang mengikuti program tersebut. Hingga saat ini PKBM Kencana Ungu berkembang pesat dalam melayani pendidikan nonformal, dan telah memiliki sarana prasarana belajar yang cukup memadai baik untuk penyelenggaraan program Pendidikan Usia Dini (PAUD), KF, Kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C, serta Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH) dan pelayanan pendidikan vokasional lainnya, dan jangkauan warga belajarnya terbuka, bukan hanya diperuntukkan bagi warga Suku Baduy melainkan penduduk Leuwidamar lainnya yang memerlukan pendidikan. Oleh sebab itu, tempat belajar di PKBM Kencana Ungu serupa gedung sekolah, dilengkapi dengan fasilitas belajar, buku paket, buku umum dan buku materi dengan penerangan listrik yang cukup.

Pada tahun 2016 program pendidikan Kesetaraan untuk warga belajar masyarakat Baduy Luar di PKBM Kencana Ungu seluruhnya ada 75 orang, terdiri dari yakni: 48 orang mengikuti program kesetaraan Paket A, 20 orang Paket B, dan 7 (tujuh) Paket C. Di antara tujuh warga belajar program Paket C tersebut satu di antaranya adalah Sarpin, tokoh Baduy Luar yang juga pengelola dan pengurus PKBM Kencana Ungu.

Kegiatan pembelajaran untuk program kesetaraan ini dilakukan setiap hari Sabtu dan Minggu, setiap hari diberikan dua materi dengan lama pembelajaran selama 3 jam (masing-masing materi 90 menit). Materi pembelajaran pendidikan kesetaraan sama dengan pendidikan persekolahan, yakni Paket A setara dengan materi pembelajaran SD, Paket B, setara materinya dengan SMP, demikian pula untuk Paket C, materi pembelajarannya setara dengan materi yang diberikan pada SMA. Hanya pengemasan dan penyajian materi pembelajaran pada pendidikan kesetaraan dilaksanakan dan dikemas secara lebih sederhana, disesuaikan dengan konteks dan kehidupan sehari-hari masyarakat setempat dan berguna untuk memecahkan persoalan kehidupannya. Menurut Pak Sarpin,

khusus bagi kelompok masyarakat Baduy untuk matapelajaran Agama ditiadakan karena masyarakat Suku Baduy masih memegang teguh kepercayaan Sunda Wiwitan. Perekrutan peserta belajar Paket A dari masyarakat Baduy dilakukan oleh Sarpin, berasal dari peserta KF yang telah menyelesaikan program dan usianya muda serta memiliki keinginan yang kuat untuk mengikuti pendidikan Paket A sampai selesai. Sedangkan peserta didik Paket B berasal dari warga belajar yang telah lulus Paket A pada tahun sebelumnya; demikian pula warga belajar Paket C merupakan lulusan dari program Paket B yang berminat meneruskan pendidikan pada jenjang berikutnya. Pada 2 tahun terakhir ini ada bantuan dari perusahaan (CSR) untuk biaya transport Rp5.000,00, seragam dan alat tulis bagi warga belajar untuk meningkatkan rasa percaya diri dan menekan tingkat absensi yang biasanya cukup tinggi. Berkat bantuan ini, warga belajar menjadi lebih tertib, bersih dan disiplin datang di PKBM yang berjarak lebih dari 10 km menggunakan mobil yang dicarter bersama setiap Sabtu dan Minggu.

Tenaga yang mengajar pada program kesetaraan ini adalah para guru SD dan SMP dan warga lainnya dari Kecamatan Leuwidamar dibantu oleh beberapa warga Baduy Dalam. Seperti halnya pada KF, pembelajaran pada pendidikan kesetaraan ini tidak hanya mengandalkan kegiatannya di PKBM. Di luar jadwal pembelajaran di PKBM, di lima kampong atau dusun Desa Kanekes diadakan kelompok belajar tutor sebaya untuk pembelajaran program Paket A dan Paket B. Diketahui ada 6 (enam) orang menjadi tutor sebaya untuk pendidikan kesetaraan ini berasal dari orang Baduy Luar di kampung Kanekes. Mereka telah mengikuti program pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C, dapat mengatur waktu, tempat dan menjaga diri dengan aturan adat, serta memiliki bahan dan tata cara pembelajaran seperti tutor program kesetaraan di PKBM.

Pendidikan kesetaraan ini merupakan program pendidikan nonformal yang dinilai paling sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat suku Baduy Luar karena pelaksanaan pembelajarannya tidak seperti sekolah. Waktu pembelajarannya tidak terikat dan tempatnya terjangkau serta materi pembelajarannya banyak disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan budaya Baduy. Program pendidikan kesetaraan ini dibutuhkan oleh masyarakat Baduy Luar karena tantangan kehidupan yang semakin sulit karena terbatasnya sumber mata pencaharian hidup, dan agar dapat menghadapi dan bahkan memanfaatkan modernisasi dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Melalui pendidikan kesetaraan ini dapat dijadikan jembatan untuk dapat berkomunikasi, berdagang,

sebagai pengusaha, bahkan berpolitik membela kehidupan suku Baduy atau meniti karir dalam kekuasaan di eksekutif maupun legislatif. Kendati demikian, para pengetua lembaga adat tetap berpesan agar kepintaran yang diperoleh dari pendidikan “sekolah” tersebut tidak meninggalkan ajaran dan norma adat Suku Baduy.

3.2.3 Pendidikan Formal (“Persekolahan”)

Masyarakat adat Suku Baduy secara aturan adat melarang warganya bersekolah melalui pendidikan formal. Sekolah dinilai dapat memberikan kepintaran duniawi yang hanya menghargai materi dan kemewahan. Pada akhirnya, setelah selesai sekolah mereka akan lupa akan adat dan budaya masyarakat Baduy, bahkan secara fisik dan mental meninggalkan komunitas adat Baduy. Berdasarkan anggapan tersebut maka anak-anak Suku Baduy dilarang untuk bersekolah di SD, SMP, SMK dan yang sederajat, agar mereka tetap teguh dan setia pada komunitas adatnya. Oleh sebab itu di tanah adat Desa Kanekes tempat orang Baduy bermukim, hingga saat ini belum ada pendidikan formal, baik SD, SMP, SMA, SMK dan yang sederajat yang dibangun oleh pemerintah Lebak di dalam wilayah Desa Kanekes. Jadi di seluruh wilayah adat Baduy di tanah adat Kanekes tidak ada bangunan sekolah karena dilarang oleh adat. Namun, jika ditelusuri ada wilayah khusus di Desa Kanekes yang telah dibangun MI dan MTS. Namun, madrasah tersebut berada di luar tanah adat Suku Baduy. Secara historis, tanah itu milik adat, hanya kemudian diberikan kepada Departemen Agama untuk kepentingan khusus.

Kendati demikian, pada saat ini tampaknya telah ada perubahan terhadap larangan tersebut. Beberapa warga masyarakat Baduy Luar pada tahun-tahun terakhir ini telah ada yang mengikuti pendidikan formal. Menurut penjelasan kepala UPT Leuwidamar dan seorang kepala sekolah SMP, pada tahun 2016 ini anak-anak warga Baduy Luar yang bersekolah di tingkat SD kurang lebih 40 anak (tersebar di 8 SDN Leuwidamar), di tingkat SMP ada 17 anak (tersebar di 4 SMPN Leuwidamar) dan di tingkat sekolah menengah (SMA dan SMK Leuwidamar) ada 6 anak. Bahkan saat ini sudah ada 2 orang yang menempuh studi di perguruan tinggi.

Ini merupakan gejala perubahan, kendati pemuka adat tetap pada ketentuan adat mengambil sikap yang intinya “tidak menyuruh dan tidak melarang” warganya mengikuti pendidikan formal, sejauh warganya tetap memegang aturan adat.

Terkait dengan aturan adat ini, umumnya anak-anak yang bersekolah umumnya tetap menghormati dan mentaati ketentuan adat. Misalnya, anak-anak memakai pakaian seragam sekolah setelah keluar dari wilayah komunitas adatnya di Desa Kanekes. Jadi saat pergi sekolah anak-anak memakai pakaian biasa, dan tetap membawa pakaian seragamnya di tas, setelah keluar desa adatnya baru berganti pakaian seragam sekolah. Banyak anak-anak sekolah SD maupun SMP menitipkan pakaiannya pada penduduk di perbatasan untuk mengurangi beban di tasnya.

Banyaknya anak-anak Baduy yang mulai sekolah di sekolah formal ini juga didorong oleh kemajuan penduduk yang mulai melek aksara dan meningkatnya pendidikan penduduk warga Baduy sehingga menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya pendidikan bagi anak-anaknya. Selain itu tokoh-tokoh masyarakat, seperti Sarpin juga tetap memberikan motivasi, bahkan turun langsung ikut mengantar dan mendaftarkan beberapa anak masuk SD, misalnya ada 2 anak SDN 2 Bojong Kaler karena orangtuanya masih takut pada ketentuan adat. Beberapa siswa yang lain mengaku diantar oleh ibunya dengan hati-hati mendaftarkan anaknya di SD tersebut. Fakta ini menunjukkan bahwa ketentuan dan lembaga adat masih perlu diperhatikan dan dihormati oleh masyarakat Baduy Luar dalam memutuskan anaknya bersekolah di pendidikan formal.

Pemerintah Kabupaten Lebak masih menyadari kesulitan dalam meningkatkan partisipasi penduduk Desa Kanekes untuk bersekolah. Upaya agar anak-anak tertarik dan tetap bertahan sekolah adalah terus meningkatkan kecukupan dan kualitas pelayanan pendidikan di sekitar Desa Kanekes tempat komunitas Suku Baduy bermukim. Kondisi pelayanan pendidikan formal yang telah disediakan oleh pemerintah kabupaten masyarakat Lebak di Kecamatan Leuwidamar dapat disimak pada tabel berikut.

Tabel 3.1 Profil Pendidikan Kecamatan Leuwidamar, 2014

Jumlah Sekolah menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2014(unit)					
No.	D E S A	TK/PAUD	SD/MI	SMP/MTs	SMA/SMK/MA
001	Kanekes	0	1	1	0
002	Nayagati	1	5	1	0
003	Bojongmenteng	0	4	2	1
004	Cisimeut	1	2	1	1
005	Margawangi	1	1	0	0
006	Sangkanwangi	1	3	1	1
007	Jalupangmulya	2	3	1	0
008	Leuwidamar	2	3	1	1
009	Cibungur	0	5	2	1
010	Lebak Parahiang	2	4	1	0
011	Wantisari	1	3	1	1
012	Cisimeut Raya	2	3	0	0
Jumlah		13	37	12	6

3.3 Hambatan dan Kendala Pelayanan Pendidikan pada Masyarakat Suku Baduy

Pelayanan pendidikan untuk masyarakat Suku Baduy telah dilakukan oleh pemerintah daerah Lebak dan masyarakat serta dukungan dari pemerintah pusat (Kemendikbud). Kendati telah diupayakan untuk melayani pendidikan dengan berbagai jenis dan cara, namun tingkat partisipasi masyarakat Baduy untuk mengikuti pendidikan belum berkembang secara optimal. Diakui bahwa pada masyarakat Suku Baduy Luar sudah mulai lebih menerima pendidikan formal maupun nonformal kendati dengan beberapa cara yang “tersembunyi” dan dalam jumlah peserta didik yang masih terbatas. Ada beberapa hambatan dan kendala mengapa pelayanan pendidikan bagi masyarakat Suku Baduy belum optimal seperti yang diharapkan, terutama untuk mendukung wajib belajar; antara lain sebagai berikut.

3.3.1 Aspek Budaya

Norma adat dan masyarakat adat Suku Baduy, terutama para tokoh adat secara budaya menganggap bahwa mereka telah memiliki sistem pendidikan sendiri untuk menginternalisasikan berbagai pengetahuan, sikap dan keterampilan tentang keluhuran hidup, alam semesta, sistem kepercayaan, kekerabatan, mata pencaharian hidup, bahasa, kesenian, dan religi serta nilai-nilai budaya lainnya untuk kelangsungan hidup dan melestarikan nilai-nilai luhur nenek moyangnya. Kondisi ini dipercaya telah mencukupi untuk bekal hidup sesuai yang digariskan oleh leluhurnya. Oleh sebab itu pendidikan dari luar yang sifatnya “formal” pada prinsipnya masyarakat Baduy tidak mau menerimanya. Bahkan ada anggapan bahwa pendidikan formal atau “sekolah” dianggap oleh masyarakat adat Suku Baduy hanya memberikan kemampuan yang sifatnya keduniawian semata dan dapat berakibat warga Baduy meninggalkan komunitas dan aturan adat. Pendidikan persekolahan dinilai bertentangan dengan nilai-nilai komunitas adat yang mengarah pada kesederhanaan dan kebahagiaan karena akan menjadikan orang Baduy serakah, tidak jujur, melawan adat dan sumber malapetaka. Hal ini merupakan hambatan dan kendala yang bersifat budaya untuk kelancaran pelayanan pendidikan pada masyarakat Baduy. Kepercayaan bahwa pendidikan sekolah merupakan “petaka” terutama terdapat pada masyarakat Baduy Dalam, sedangkan pada masyarakat Baduy Luar telah mulai ada kesadaran akan arti pentingnya pendidikan persekolahan bagi kelangsungan dan perkembangan kehidupan masyarakat Baduy di masa depan. Oleh karena itu wilayah Desa Kanekes, terutama di wilayah hak tanah ulayat komunitas adat Suku Baduy belum ada bangunan sekolah. Adat melarang pembangunan sekolah di wilayah adat Baduy. Bangunan sekolah adanya di luar wilayah adat Baduy.

3.3.2 Aspek Geografis

Kondisi geografis pemukiman masyarakat Baduy menghambat akses pelayanan pendidikan. Masyarakat Baduy di Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar bermukim di daerah Pegunungan Kendeng yang tersebar di lebih dari 50 pedukuhan. Di lokasi Desa Kanekes yang berbukit tersebut belum ada infrastruktur jalan antar desa, semuanya masih asli berupa jalan setapak yang sempit dan licin. Pembangunan jalan dan pemukiman memang dilarang adat; kondisi dan struktur tanah dilarang diratakan dan dirubah. Oleh sebab itu hingga saat ini tidak ada infrastruktur jalan yang memudahkan transportasi baik untuk hubungan antar pedukuhan, lebih-lebih untuk menjangkau daerah di luar Desa

Kanekes yang jauh dan sulit. Masyarakat adat juga melarang warganya untuk menggunakan peralatan transportasi, baik sepeda maupun sepeda motor untuk perjalanan mereka. Oleh sebab itu, untuk menjangkau wilayah luar Desa Kanekes mereka berjalan kaki menempuh waktu 1-4 jam perjalanan kaki.

Sekolah formal, yakni SD, SMP, SMA dan SMK serta pelayanan pendidikan nonformal berada di luar Desa Kanekes yang jaraknya 1-4 jam juga. Kondisi tersebut menjadi salah satu kendala sulitnya menjangkau pelayanan pendidikan bagi warga masyarakat Baduy. Beberapa warga Baduy sendiri yang telah memiliki keinginan untuk memperoleh pendidikan di luar lingkungan Desa Kanekes juga mengalami kesulitan transportasi, karena jauh, lama perjalanan kaki dan kondisi alam yang sulit. Demikian pula para aktifis dan petugas pendidikan mengalami kesulitan untuk menjangkau mereka.

3.3.4 Orangtua Tidak Mampu

Pada umumnya masyarakat Suku Baduy kemampuan ekonominya minim, oleh karena sumber penghasilannya sebagian besar dari pertanian dan beberapa warga berjualan hasil hutan dan kain tenun. Oleh sebab itu dari segi ekonomi masyarakat Baduy termasuk miskin, karena penghasilan dari pertanian dan hasil menenun hanya cukup untuk kebutuhan dasar, terutama sandang dan pangan, sedangkan untuk keperluan lain kemampuannya terbatas. Kondisi ini terjadi pada masyarakat Baduy Dalam maupun Baduy Luar. Oleh sebab itu beberapa warga masyarakat Baduy Luar yang telah mengikuti pendidikan KF, kesetaraan dan sekolah di luar Desa Kanekes mengalami kesulitan jika harus menyiapkan biaya pendidikan. Para peserta didik masyarakat Baduy Luar menemui kesulitan untuk membeli alat tulis, uang jantas untuk sekolah; bahkan untuk biaya transport dari Desa Kanekes ke PKBM atau sekolah. Ketiadaan dana untuk keperluan tersebut seringkali menghambat kehadiran siswa di PKBM atau sekolah. Umumnya para siswa dan warga belajar tidak mampu membeli buku-buku, alat tulis, dan keperluan belajar lainnya.

3.3.5 Kemampuan Lembaga Pendidikan

Hambatan lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat seperti PKBM dalam pelaksanaan program kesetaraan adalah keterbatasan dana. PKBM telah berupaya untuk menjangkau sebanyak mungkin warga belajar yang berasal dari Suku Baduy, namun mengalami keterbatasan dalam hal pendanaan untuk

biaya pelaksanaan pembelajaran yang mencakup sarana prasarana belajar, alat dan bahan pembelajaran, ATK dan honor bagi para tutor. Oleh sebab itu, pelaksanaan pembelajarannya belum dapat berjalan secara maksimal.

3.3.6 Kehadiran Warga Belajar

Hambatan lain yang dihadapi dalam pelaksanaan program kesetaraan ini adalah tingkat kehadiran dari masyarakat Baduy yang belum mencapai seratus persen. Hal ini dikarenakan sebagian warga Baduy terkadang harus berladang sehingga mereka terpaksa meninggalkan pembelajaran di PKBM. Meskipun demikian, pihak penyelenggara PKBM tetap optimis bahwa program kesetaraan ini dapat tetap berjalan baik.

3.4 Beberapa Harapan Masyarakat Suku Baduy

Para pimpinan adat masyarakat Suku Baduy memiliki harapan untuk pelestarian, eksistensi dan pengembangan kebudayaan Suku Baduy. Semuanya yang diharapkan itu untuk kebaikan kehidupan dan masa depan masyarakat Suku Baduy. Beberapa harapan masyarakat Suku Baduy disampaikan sebagai berikut.

- a. Nilai-nilai budaya dan kearifan lokal komunitas adat budaya Baduy hendaknya dimanfaatkan sebagai materi pembelajaran bagi generasi muda saat ini dan bagi peserta didik yang sekolah di Leuwidamar dan siswa dari sekolah di Lebak dan wilayah yang lebih luas lagi. Pembelajaran dapat dilakukan dengan memasukkan materi kurikulum lokal dengan sumber belajar dari tokoh Baduy Luar. Pembelajaran juga dapat dilakukan melalui kegiatan visit-kunjungan wisata untuk beberapa hari para siswa dari wilayah Lebak maupun dari daerah lain dengan menginap, hidup dan belajar budaya Baduy seperti menenun, bertani, berkesenian masyarakat adat Baduy dan sebagainya. Ini membawa dua dampak positif yakni anak-anak dapat belajar budaya luhur dari Suku Baduy dan bagi masyarakat Baduy merasa dihargai dan memperoleh tambahan penghasilan dari kunjungan wisata ini.
- b. Dukungan Sumberdaya (Dana) untuk membantu penyelenggaraan pendidikan adat Suku Baduy baik dalam pendidikan keluarga, komunitas kerabat yang lebih luas, sampai pada tingkat lembaga adat yang lebih tinggi untuk pendidikan adat bagi warga Suku Baduy.
- c. Sosialisasi tentang fungsi dan pentingnya pendidikan baik melalui pendidikan formal, nonformal dan informal kepada masyarakat dan pimpinan

lembaga adat Suku Baduy bahwa pendidikan tersebut tidak dimaksudkan untuk memberikan kemampuan yang sifatnya keduniawian semata dan agar warga Baduy meninggalkan komunitas dan aturan adat, melainkan dapat saling melengkapi. Pendidikan yang dilaksanakan oleh komunitas adat yang mengarah pada kesederhanaan dan kebahagiaan sejati didayagunakan sebagai dasar untuk hidup yang dilengkapai dari pengetahuan yang bersumber dari sekolah.

d. Pelaksanaan pendidikan hendaknya tetap melibatkan orang-orang Baduy agar secara kontekstual mengetahui permasalahan dan kebutuhan masyarakat Baduy sehingga hasilnya lebih berguna untuk kehidupannya tanpa meninggalkan adat Suku Baduy. Pengembangan kelompok belajar melalui Tutor Sebaya dinilai sangat cocok dengan situasi masyarakat Baduy karena dapat menyesuaikan waktu, tempat, sumber belajar dan strategi lainnya agar tetap memenuhi aturan adat.

e. Warga Belajar yang mengikuti pendidikan KF, kesetaraan dan sekolah di luar Desa Kanekes memerlukan bantuan dana untuk transportasi karena tempat tinggalnya jauh dan sulit dari tempat pembelajaran (PKBM). Dana personal, seperti untuk transportasi, alat tulis dan uang saku sebagaimana bantuan bagi siswa miskin dalam Program Indonesia Pintar (PIP) perlu diberikan kepada warga Baduy yang sedang menempuh pendidikan mendorong anak-anak tetap melanjutkan pendidikannya. Terkait dengan pendanaan ini, dunia usaha yang memiliki kepedulian terhadap pendidikan dapat membantu melalui program CSR terhadap pendidikan Suku Baduy, sebagaimana sudah dimulai oleh perusahaan jasa transportasi yang menyumbang buku-buku, alat tulis, dan transportasi warga belajar bagi anak-anak Baduy.

f. Pelayanan pendidikan formal lebih ditingkatkan mutu pelayanannya, selain meningkatkan kualitas sarana prasanana pendidikan juga meningkatkan mutu pembelajaran yang menarik dengan mendayagunakan konteks budaya lokal (Baduy).

3.5 Model Pelayanan Pendidikan bagi Masyarakat Suku Baduy

Menyimak temuan studi pada masyarakat Suku Baduy dan pemikiran pengembangan interpretatif maka model pengembangan pelayanan Pendidikan bagi Masyarakat Suku Baduy selayaknya mempertimbangkan beberapa aspek penting, antara lain karakter sosial-budaya masyarakatadat Baduy, tantangan

perkembangan kehidupan masyarakat di luar wilayah Baduy, dan kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah yang dimaksud adalah kebijakan dan program yang ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah Kabupaten Lebak.

Berdasarkan pertimbangan tersebut selayaknya model pendekatan pelayanan pendidikan pada masyarakat Suku Baduy tidak serta merta disamaratakan dalam jenis, cara, pendekatan dan strateginya untuk semua warga Baduy. Dari sisi budaya, kendati mereka memiliki dasar dan akar budaya yang sama sebagai Suku Baduy namun pada kenyataannya mereka bukanlah merupakan satu komunitas adat yang sama dan tidak persis serupa. Paling tidak terdapat dua kelompok komunitas yakni Baduy Dalam dan Baduy Luar yang masing-masing memiliki karakter yang berbeda dalam menanggapi perubahan zaman. Masyarakat Baduy Dalam dapat dikatakan representasi dari masyarakat Baduy masa lalu, pewaris asli budaya dan amanat leluhur kesukuan mereka. Masyarakat Baduy Dalam yang mendiami tiga pedukuhan di Desa Kanekes memiliki aturan adat yang kuat yang melarang setiap warga Baduy untuk mengikuti pendidikan formal maupun nonformal di sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat. Oleh sebab itu tidak ada warga Baduy Dalam yang terdaftar legal pernah menempuh dan tamat pendidikan, baik formal maupun nonformal.

Adapun masyarakat Baduy Luar yang komunitasnya lebih besar menghuni sekitar 50 pedukuhan di Desa Kanekes merupakan komunitas Baduy yang lebih terbuka, aturan adatnya lebih cair/fleksibel, dan sekaligus dipersiapkan sebagai penjaga, penyangga, penyaring, pelindung masyarakat Baduy Dalam dari pengaruh luar. Oleh sebab itu, dibanding warga Baduy Dalam, mereka secara lebih leluasa bergaul, berkomunikasi, berinteraksi dan bersilaturahmi secara intensif dengan pihak luar suku Baduy. Tetua adat lebih lentur menerima perubahan masyarakat dan teknologi dari luar. Demikian pula dalam aspek pendidikan, suku Baduy Luar tidak demikian kaku menolak mentah-mentah pendidikan, namun juga tidak mau melanggar norma adat yang melarang pendidikan. Para tetua adat masyarakat suku Baduy Luar mengambil posisi netral tentang pendidikan “sekolah” dengan ungkapan bahwa soal pendidikan pimpinan adat Baduy Luar “tidak melarang, tetapi juga tidak menyuruh”. Artinya jika ditemukan warga masyarakat yang mengikuti pendidikan formal maupun nonformal maka mereka tidak akan mencegah dan melarangnya. Mereka menganggap pula bahwa warganya bersekolah bukan karena disuruh oleh pimpinan adat. Oleh sebab itu, para tetua adat Suku Baduy Luar seolah-olah

tutup mata, tidak melarang dan tidak juga mencegah warganya yang semakin banyak mengikuti pendidikan formal dan nonformal di luar Desa Kanekes.

Berdasarkan kategori kelompok dan karakter Suku Baduy Dalam dan Baduy Luar, serta perkembangan masyarakat dan kebijakan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah Kabupaten Lebak maka dikemukakan beberapa opsi model pelayanan pendidikan yakni pendekatan atau model: (1) Penguatan Internalisasi Budaya Baduy, (2) Pendidikan Tersembunyi, (3) Pendidikan Keaksaraan (Dasar dan Fungsional), (4) Model Pendidikan Kesetaraan, (5) Implementasi Bentuk Pendidikan Lainnya (Inklusi, Kursus, dan sebagainya). Model pelayanan pendidikan tersebut dapat diimplementasikan secara simultan dengan memperhatikan kondisi tertentu.

3.5.1 Model Penguatan Internalisasi Budaya Baduy

Model Penguatan Internalisasi Budaya Baduy ini merupakan sistem pendidikan adat Suku Baduy yang berlaku bagi seluruh warga masyarakat Baduy, baik Baduy Dalam maupun Baduy Luar. Pendidikan di masyarakat Baduy, baik Baduy Dalam maupun Baduy Luar berbeda dengan pendidikan yang berlaku di kehidupan modern seperti sekarang ini. Pendidikan pada masyarakat Baduy memiliki konsep yang sederhana dibandingkan dengan pendidikan modern. Konsep tersebut disesuaikan dengan aturan, ajaran dan tatanan hukum adat. Proses dan prioritas pendidikan model *Papagahan* (saling mengajari sesama warga) di komunitas Baduy lebih diutamakan dan diarahkan pada pemahaman tentang dasar-dasar hukum adat yang disampaikan secara lisan dan percontohan pada setiap anak cucunya dan tidak dalam bentuk tulisan. Materi atau substansi pendidikan yang diajarkan oleh mereka secara turun temurun pada dasarnya adalah sesuai dengan kebutuhan hidup masyarakat Suku Baduy. Aspek aturan hidup, ekonomi, sosial, serta lingkungan merupakan materi pelajaran yang diajarkan bagi semua masyarakat. Semenjak dari usia anak-anak, remaja, dewasa sampai akhir hayatnya warga masyarakat Baduy wajib memahami, menguasai dan menghayati adat budaya Suku Baduy antara lain dari aspek religi, kekerabatan, sistem mata pencaharian, bahasa, kesenian, dan nilai-nilai budaya Suku Baduy lainnya. Mereka tidak dianjurkan untuk memahami banyak ilmu pengetahuan dari sistem persekolahan dari luar seperti masyarakat pada umumnya. Hal ini dikarenakan adanya kekawatiran akan berubahnya hukum adat dari leluhur yang semestinya terus dijaga dan diwariskan. Proses belajar yang dilakukan masyarakat Baduy tidak dalam suatu perkumpulan yang disengaja

untuk melakukan proses belajar, namun lebih sering antar orang tua dengan anak atau antar teman di ladang maupun di luar wilayah Baduy. Proses internalisasi budaya Baduy bagi warga masyarakat komunitas Baduy Dalam dan Baduy Luar tersebut perlu lebih dikuatkan dalam rangka pelestarian dan pengembangan Budaya Baduy serta guna mempertahankan eksistensi kehidupannya antara lain melalui dukungan fasilitas dan kemudahan pemerintah dan pemerintah daerah Lebak.

Tabel 3.2 Opsi Model Layanan Pendidikan bagi Warga Masyarakat Baduy Kabupaten Lebak

NO.	MODEL LAYANAN	ARAH/TUJUAN	PENJELASAN
1.	Internalisasi Budaya Suku Baduy	Sebagai penguatan Budaya Baduy, baik bagi komunitas Baduy Dalam maupun Baduy Luar yang ditujukan untuk mempertahankan eksistensi, upaya pelestarian dan pengembangan Budaya Baduy. Setiap warga Baduy wajib memahami, menguasai dan menghayati adat budaya Suku Baduy mencakup aspek religi, kekerabatan, sistem mata pencaharian, bahasa, kesenian, dan nilai dan norma budaya Suku Baduy lainnya.	Internalisasi dilakukan oleh keluarga, kerabat, masyarakat dan tetua adat Suku Baduy menggunakan pendekatan adat yang didukung dan dikuatkan dengan fasilitas serta pendanaan dari pemerintah. Pendidikan model <i>Papagahan</i> (saling mengajari sesama warga) di komunitas Baduy lebih diutamakan dan diarahkan pada pemahaman tentang dasar-dasar Budaya Baduy.
2.	Pendidikan Tersembunyi	Pengenalan awal Baca Tulis Hitung (Calistung) sederhana bagi warga masyarakat komunitas Baduy Luar dan secara terbatas bagi masyarakat	Pendekatan Tutor Sebaya dilakukan oleh warga Baduy Luar yang telah bisa Calistung atau kader yang secara tersembunyi dan tidak kentara mengajari

		Baduy Dalam. Selain memberikan kemampuan Calistung sederhana agar paham dan tidak dibohongi dalam berinteraksi dan transaksi jual beli dengan orang luar, sekaligus sebagai pendekatan awal pemberantasan buta aksara.	Calistung dengan bahan-bahan sederhana (bungkus rokok, makanan, tulisan tempat barang tertentu) dikaitkan dengan alam dan konteks budaya Baduy. Pendidikan model <i>Papagahan</i> dapat diterapkan dalam pendekatan ini.
3.	Pendidikan Keaksaraan (Dasar dan Fungsional)	Pendidikan keaksaraan (Calistung) yang disertai dengan memberikan muatan kecakapan hidup/keterampilan yang dapat dimanfaatkan untuk bekerja atau berperan dalam kehidupan bermasyarakat (<i>Functional literacy</i>). Kecakapan fungsional yang dikembangkan antara lain kerajinan tenun, jual beli produk pertanian, dsb. Kecakapan tersebut diarahkan pada peningkatan keberdayaan ekonomi melalui pemanfaatan keunggulan potensi lingkungannya. Layanan ini ditujukan bagi warga masyarakat komunitas Baduy Dalam dan Baduy Luar.	Target peserta pendidikan kesetaraan ini adalah mereka yang berusia 15 tahun ke atas dan belum bisa membaca dan menulis, namun tidak menutup kemungkinan untuk melibatkan warga berusia di bawah 15 tahun, jika mereka belum pernah bersekolah, seperti halnya banyak terdapat pada warga Suku Baduy. Pelaksanaan pendidikannya dibina oleh PKBM di luar Desa Kanekes, sedangkan kelompok belajar mandiri dilakukan masih agak tersembunyi (belum terbuka) di pedukuhan Kanekes oleh tutor sebaya dan para kader dari Baduy Luar sehingga memahami kebutuhan dan permasalahan belajarnya.
4.	Pendidikan	Layanan ini merupakan program pendidikan	Sasaran pendidikan kesetaraan ini memang

	Kesetaraan	<p>nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakup program Paket A, Paket B, dan Paket C. Layanan ini ditujukan bagi warga masyarakat Baduy Luar. Layanan pendidikan kesetaraan ini juga dipadukan dengan pengembangan kemampuan kecakapan hidup/ keterampilan yang dapat dimanfaatkan untuk bekerja atau berperan dalam kehidupan bermasyarakat.</p>	<p>warga masyarakat yang karena berbagai alasan dan kondisi sehingga tidak dapat menempuh pendidikan pada jalur formal. Juga mereka yang putus dalam jenjang atau antar jenjang. Pendidikan Kesetaraan dapat diselenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan sebaiknya melibatkan tutor dari warga Baduy yang telah berkompeten. Kekuatan layanan ini antara lain waktu dan tempat belajar dapat disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat dan biaya pendidikannya murah. Oleh sebab itu model layanan pendidikan kesetaraan (nonformal) ini relatif mudah diterima masyarakat Baduy Luar.</p>
5.	Pendidikan “Sekolah” (Formal)	<p>Layanan pendidikan melalui sekolah (formal) masih sulit diterima oleh masyarakat Baduy. Masih ada persepsi negatif terhadap pendidikan formal yang dinilai akan mengancam eksistensi adat dan kebudayaan Baduy, bahkan bisa meninggalkan aturan adat</p>	<p>Opsi pilihan pendidikan formal umumnya dipilih oleh anak-anak yang memiliki saudara atau orang tua Baduy Luar yang menjadi kader, tutor sebaya atau memiliki pandangan yang positif terhadap pendidikan. Oleh sebab itu pelayanan pendidikan formal di tingkat SD, SMP</p>

		serta keluar dari komunitas Suku Baduy. Tujuan pendidikan formal juga dinilai hanya mendidik orang menjadi manusia yang materialistis, memikirkan duniawi semata. Kendati demikian secara perlahan dan sedikit demi sedikit layanan ini sudah mulai dijadikan opsi pilihan pendidikan bagi beberapa orang Baduy Luar, baik di tingkat SD, SMP maupun SMA.	maupun SMA-SMK yang ada di Kecamatan Leuwidamar dapat menjadi pilihan bagi warga Baduy yang mau memanfaatkan layanan pendidikan formal.
6.	Pelayanan Lainnya (Inklusi, Kursus, dan sebagainya)	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan pendidikan inklusi di sekolah formal (baik di tingkat SD, SMP maupun SMA) yang memberikan program layanan khusus bagi warga masyarakat yang secara geografis, sosial dan budaya sulit dijangkau untuk memberikan fasilitas dana dan pendekatan tertentu sehingga terlayani. Ini ditujukan pada warga Baduy yang bersekolah pada pendidikan formal dengan tujuan terlayani dan menghindari putus sekolah. • Layanan lain yang berguna bagi 	<ul style="list-style-type: none"> • Program ini dapat diusulkan oleh Dinas Pendidikan Lebak kepada Direktorat PKLK, Dirjen Dikdasmen. Pendidikan inklusi selain melayani anak-anak yang ingin bersekolah, juga dapat dikembangkan untuk melayani anak yang berbakat, berkebutuhan khusus, baik warga Baduy maupun masyarakat umum. • Pendidikan dan Pelatihan melalui Kursus untuk berbagai keterampilan tersebut sangat diperlukan oleh warga Baduy karena terdesaknya kebutuhan ekonomi karena semakin terbatasnya tanah pertanian

		kemajuan kehidupan masyarakat Baduy ialah Pendidikan dan Pelatihan melalui Kursus yang dibutuhkan dan sesuai dengan masyarakat Baduy, misalnya pertenunan, tata busana, pariwisata, perdagangan, kewiraswastaan.	yang menjadi sumber utama kehidupannya.
--	--	--	---

3.5.2 Model Pendidikan Tersembunyi (Diam-diam)

Hasil pengamatan dan wawancara dengan beberapa tokoh dan kader muda Baduy diketahui bahwa beberapa anak muda pada masyarakat Baduy Dalam telah dapat membaca, menulis dan berhitung; lebih-lebih beberapa anak muda masyarakat Baduy Luar, kendati mereka belum pernah mengikuti pendidikan sekolah maupun luar sekolah. Diketahui bahwa anak-anak muda tersebut ternyata memiliki kemauan yang kuat untuk dapat membaca dan menulis untuk keperluan transaksi jual beli, interaksi dan komunikasi dengan dunia luar, dan untuk mencari tambahan penghasilan di luar dari sektor pertanian. Berdasarkan dorongan tersebut mereka belajar melalui kertas pembungkus dan barang-barang yang berasal dari luar yang memuat angka, huruf dan gambar. Terkadang mereka berjalan jauh dari desanya untuk melihat acara televisi yang ada di warung di perbatasan Desa Kanekes. Mereka menebak-nebak arti dan makna huruf dan angka serta gambar-gambar yang mereka lihat. Selanjutnya, mereka saling belajar sendiri yang biasanya diteruskan secara diam-diam dan tersembunyi menanyakannya kepada warga Baduy Luar yang telah menguasai Calistung karena telah mengikuti program keaksaraan. Pendidikan model *papagahan* (saling mengajari sesama warga) yang biasa dilakukan pada komunitas Baduy dapat diterapkan dan diarahkan pada pemahaman tentang dasar-dasar Calistung dengan konteks budaya Baduy.

Hal ini menunjukkan bahwa model pengenalan awal Calistung ini dapat diprogramkan melalui anak-anak muda dari Baduy Luar yang secara diam-diam dapat mengajari Calistung kepada anak-anak muda warga Baduy Dalam di berbagai kesempatan, waktu dan tempat dengan caranya sendiri menggunakan

alat dan sumber belajar yang sederhana sesuai dengan kondisi dalam lingkungan masyarakat Baduy. Secara sembunyi–diam–diam–, anak-anak muda tersebut selanjutnya dapat menularkan pengetahuan dan keterampilan Calistung bagi warga Baduy Dalam lainnya yang memiliki keinginan memahami Calistung untuk mengembangkan kehidupannya. Model seperti ini secara perlahan dan tanpa kentara menghasilkan beberapa anak muda Suku Baduy Dalam dapat menguasai Calistung untuk keperluan bertransaksi dan berkomunikasi dengan orang luar Baduy, bahkan menggunakan HP. Mereka umumnya menggunakan HP dengan meminjamnya dari teman yang bermukim di wilayah Baduy Luar yang saat memakainya juga dilakukan di Baduy Luar. Ini dilakukan mengingat larangan penggunaan peralatan elektronika dan teknologi modern di wilayah Baduy Dalam.

Dengan demikian model pengenalan awal Baca Tulis Hitung (Calistung) sederhana bagi warga masyarakat Baduy menjadi salah satu pendekatan pembelajaran dengan fokus program mendorong anak-anak yang telah menguasai Calistung memberikan “pelatihan” secara tersembunyi dan diam-diam kepada anak-anak Baduy yang lain. Selain memberikan kemampuan Calistung sederhana agar paham dan tidak dibohongi dalam berinteraksi dan transaksi jual beli dengan orang luar, juga sekaligus sebagai pendekatan awal pemberantasan buta aksara. Tutor dilakukan oleh warga Baduy Luar yang telah bisa Calistung atau kader yang secara tersembunyi dan tidak kentara mengajarkan Calistung dengan bahan-bahan sederhana (bungkus rokok, makanan, tulisan, gambar pada tempat barang tertentu) dikaitkan dengan alam dan konteks budaya Baduy.

3.5.3 Model Pendidikan Keaksaraan Fungsional

Salah satu model pendidikan pada Suku Baduy yang dinilai lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan serta kondisi masyarakat ialah Model Pendidikan Keaksaraan Fungsional. Pada awalnya kemampuan keaksaraan yang diberikan adalah paling dasar di mana penilaiannya didasarkan hanya sebatas kemampuan membaca, menulis dan berhitung (Calistung). Sejalan dengan itu dilaksanakan secara terpadu yakni pendidikan keaksaraan (Calistung) yang disertai dengan memberikan muatan kecakapan hidup/keterampilan yang dapat dimanfaatkan untuk bekerja atau berperan dalam kehidupan bermasyarakat (*functional literacy*).

Keaksaraan fungsional mengintegrasikan materi Calistung yang berkaitan langsung dengan perkembangan masyarakat dengan kecakapan hidup. Pada kegiatan ini peserta didik diharapkan dapat mencapai kapasitas untuk mampu mengembangkan dan mengaktualisasikan dirinya guna memberikan kontribusi yang bernilai bagi kemajuan dan kesejahteraan dirinya dan orang lain. Kecakapan fungsional yang dikembangkan pada masyarakat Suku Baduy antara lain kerajinan tenun, jual beli produk pertanian, dan sebagainya. Kecakapan tersebut diarahkan pada peningkatan keberdayaan ekonomi melalui pemanfaatan keunggulan potensi lingkungannya. Layanan ini ditujukan bagi warga masyarakat komunitas Baduy Dalam dan Baduy Luar.

Target peserta pendidikan kesetaraan ini adalah mereka yang berusia 15 tahun ke atas dan belum bisa membaca dan menulis, namun tidak menutup kemungkinan untuk melibatkan warga berusia di bawah 15 tahun, jika mereka belum pernah bersekolah, seperti halnya banyak terdapat pada warga Suku Baduy. Pelaksanaan pendidikannya dibina oleh PKBM di luar Desa Kanekes, sedangkan kelompok belajar mandiri dilakukan secara tersembunyi di pedukuhan Kanekes oleh tutor sebaya dan para kader dari Baduy Luar sehingga memahami kebutuhan dan permasalahan belajarnya.

3.5.4 Model Pendidikan Kesetaraan

Model Pendidikan Kesetaraan ini merupakan opsi pelayanan pendidikan bagi masyarakat Suku Baduy yang menginginkan pendidikan yang lebih tinggi tingkatannya dibanding dengan pendidikan keaksaraan. Layanan ini merupakan program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA yang mencakup program Paket A, Paket B, dan Paket C. Layanan ini ditujukan bagi warga masyarakat Baduy Luar. Layanan pendidikan kesetaraan ini juga dipadukan dengan pengembangan kemampuan kecakapan hidup/keterampilan yang dapat dimanfaatkan untuk bekerja atau berperan dalam kehidupan bermasyarakat.

Model pendidikan kesetaraan ini juga selaras dengan kondisi alam, sosial, ekonomi budaya masyarakat Baduy. Lebih-lebih masyarakat Baduy kurang suka dengan pendidikan yang sifatnya formal, selain karena secara geografis tempat tinggalnya jauh dari sekolah, transportasi sulit, juga kemampuan ekonomi untuk membeli kebutuhan sekolah juga mengalami kesulitan. Oleh sebab itu pendidikan kesetaraan ini tepat karena sasaran pendidikan kesetaraan ini ialah

warga masyarakat yang karena berbagai alasan dan kondisi sehingga tidak dapat menempuh pendidikan pada jalur formal. Juga lemah mereka yang putus dalam jenjang atau antar jenjang. Pelayanan pendidikan kesetaraan ini fleksibel, yakni dari segi tempat, waktu, tenaga pendidik dan sumber belajar yang lainnya dapat disesuaikan dengan kondisi dan potensi masyarakat setempat. Demikian pula biaya pendidikannya juga murah sekali karena memperoleh subsidi dana dan peralatan belajar dari pemerintah. Oleh sebab itu model layanan pendidikan kesetaraan (nonformal) ini relatif mudah diterima masyarakat Baduy Luar. Pendidikan Kesetaraan dapat diselenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan sebaiknya melibatkan tutor dari warga Baduy yang telah berkompeten.

3.5.5 Pendidikan “Sekolah” (Formal)

Layanan pendidikan melalui sekolah (formal) masih sulit diterima oleh masyarakat Baduy. Masih ada persepsi negatif terhadap pendidikan formal yang dinilai akan mengancam eksistensi adat dan kebudayaan Baduy, bahkan bisa meninggalkan aturan adat serta keluar dari komunitas suku Baduy. Tujuan pendidikan formal juga dinilai hanya mendidik orang menjadi manusia yang materialistis, memikirkan duniawi semata. Kendati demikian secara perlahan dan sedikit demi sedikit layanan ini sudah mulai dijadikan opsi pilihan pendidikan bagi beberapa orang Baduy Luar, baik di tingkat SD, SMP maupun SMA. Opsi pilihan pendidikan formal ini umumnya dipilih oleh anak-anak yang memiliki saudara atau orang tua Baduy Luar yang menjadi kader, tutor sebaya atau memiliki pandangan yang positif terhadap pendidikan. Oleh sebab itu pelayanan pendidikan formal di tingkat SD, SMP maupun SMA-SMK yang ada di Kecamatan Leuwidamar dapat menjadi pilihan bagi warga Baduy yang mau memanfaatkan layanan pendidikan formal.

3.5.6. Model Layanan Pendidikan Lainnya

Opsi model layanan pendidikan yang sekiranya cocok dan bermanfaat bagi masyarakat Baduy yaitu Pelayanan Pendidikan Inklusi dan Pendidikan dan Pelatihan melalui Kursus. Dua pelayanan pendidikan ini merupakan program dari pemerintah pusat (Kemendikbud) yang data dirancang oleh UPTD Leuwidamar dan Dinas Kabupaten Lebak serta tokoh masyarakat Desa Kanekes dan pihak-pihak yang berkepentingan di sekitar Desa Kanekes.

3.5.6.1 Pelayanan Pendidikan Inklusi

Pelayanan pendidikan inklusi ini merupakan program pendidikan di sekolah formal (baik di tingkat SD, SMP maupun SMA) yang memberikan layanan khusus bagi warga masyarakat yang secara geografis, sosial dan budaya sulit dijangkau untuk memperoleh bantuan dana, fasilitas dan pelayanan khusus tertentu sehingga dapat mengikuti pendidikan yang layak. Layanan pendidikan ini ditujukan pada warga Baduy Luar yang bersekolah pada pendidikan formal agar memperoleh dorongan motivasi belajar dan terhindar dari ancaman putus sekolah. Pendidikan inklusi selain melayani anak-anak yang ingin bersekolah, juga dapat dikembangkan untuk melayani anak yang berbakat, berkebutuhan khusus, baik warga Baduy maupun masyarakat umum. Program ini dapat diusulkan oleh Dinas Pendidikan Lebak kepada Direktorat PKLK, Ditjen Dikdasmen.

3.5.6.1 Diklat Keterampilan Melalui Kursus

Layanan lain yang berguna bagi kemajuan kehidupan masyarakat Baduy ialah Pendidikan dan Pelatihan melalui Kursus yang dibutuhkan dan sesuai dengan masyarakat Baduy, misalnya tentang pertenunan, tata busana, pariwisata, perdagangan, kewirausahaan. Pendidikan dan Pelatihan melalui Kursus untuk berbagai keterampilan tersebut sangat diperlukan oleh warga Baduy karena terdesaknya kebutuhan ekonomi karena semakin terbatasnya tanah pertanian yang menjadi sumber utama kehidupannya.

BAB IV

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1 Simpulan

Berdasarkan atas permasalahan dalam penelitian ini dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

4.1.2 Pelayanan Pendidikan bagi Komunitas Adat Suku Laut

- a. Di Kabupaten Lingga terdapat praktik-praktik baik pelayanan pendidikan bagi komunitas adat dirintis oleh seseorang yang bernama Densi Diaz. Upaya yang dilakukannya dengan memberikan pelajaran membaca dan menulis bagi Suku Laut; menggambar, dan keterampilan/kerajinan bagi masyarakat laut seperti kerajinan akar bahar, yang diperuntukkan bagi para pengunjung/wisatawan.
- b. Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga berkomitmen untuk memberikan dukungan dana untuk Pelayanan Pendidikan bagi Suku Laut.
- c. Masyarakat Laut adalah masyarakat maritim, sehingga budaya yang dihasilkan adalah budaya maritim. Berdasarkan budaya masyarakat maritim ini dapat digunakan untuk mendukung pendidikan bagi komunitas adat Suku Laut, pengetahuan dan keterampilan yang terkait dengan kegiatan di laut akan menjadi lebih memadai.
- d. Terdapat pendidikan formal di Kabupaten Lingga untuk Suku Laut seperti di SDN 038 Senayang, Kecamatan Linau Batu Tanjung Kelit, Kecamatan Senayang. Pendidikan formal cocok bagi Suku Laut bagi mereka yang telah tinggal di daratan, tetapi pendidikan formal kalau diterapkan bagi mereka yang hidup tinggal di perahu tidak cocok.
- e. Persoalan pendidikan masyarakat laut masih berkisar tentang masalah akses pendidikan yang sulit dijangkau, masalah mata pencaharian, dan masalah ketertinggalan. Sehingga, dengan dapat membaca dan menulis saja itu sudah sangat cukup bagi Suku Laut yang tinggal nomaden.
- f. Model pembelajaran yang tepat bagi masyarakat laut yang nomaden atau terpisahkan dengan jarak yang jauh adalah dengan menyesuaikan dengan

kebutuhan masyarakat Suku Laut, yaitu model pendidikan keaksaraan, yang secara khusus perlu diupayakan pendekatan-pendekatan yang sesuai, misalnya guru harus mendatangi siswa bukan sebaliknya, siswa mendatangi guru.

4.1.3 Pelayanan Pendidikan bagi Komunitas Adat Suku Baduy

- a. Di Kecamatan Leuwidamar terdapat Pendidikan Keaksaraan, peserta pendidikan keaksaraan untuk masyarakat Baduy Luar saat ini tercatat ada 15 kelompok belajar yang masing-masing kelompok belajar ada lebih kurang 10 warga belajar, sehingga seluruhnya kurang lebih berjumlah 150 warga belajar. Di samping itu, lingkungan mereka sendiri, teman, tetangga dan keluarga saling mengajarkan membaca dan berhitung.
- b. Di Kecamatan Leuwidamar terdapat Pendidikan Kesetaraan (Paket A, Paket B, dan Paket C).
- c. Di Kecamatan Leuwidamar terdapat pendidikan formal yang peserta didiknya adalah siswa dan siswi dari Baduy Luar. Pada tahun 2016 ini anak-anak warga Baduy Luar yang bersekolah di tingkat SD kurang lebih 40 anak (tersebar di 8 SDN Leuwidamar), di tingkat SMP ada 17 anak (tersebar di 4 SMPN Leuwidamar) dan di tingkat sekolah menengah (SMA dan SMK Leuwidamar) ada 6 anak. Bahkan saat ini sudah ada 2 orang yang menempuh studi di perguruan tinggi.
- d. Masyarakat Baduy sangat ketat menjalani aturan adat mereka, seperti terdapat larangan untuk mengikuti pendidikan formal, karena pendidikan formal dianggap menjauhkan mereka dari aturan adat; masyarakat Baduy Dalam juga melarang penggunaan teknologi, seperti radio, televisi, listrik, dan teknologi lainnya; mereka juga dilarang untuk naik kendaraan dan memakai alas kaki.
- e. Masyarakat Baduy mengalami dilema, salah satu sisi ingin tetap mempertahankan budaya asli/khas mereka tetapi di sisi lain pengaruh dari luar juga cukup gencar seperti misalnya penggunaan teknologi seperti televisi, HP.
- f. Masyarakat Baduy tampaknya tidak benar-benar menutup diri untuk menerima pendidikan, mereka hanya butuh kepastian tentang manfaat pendidikan itu apa bagi kehidupan mereka.

4.2. Rekomendasi

- a. Perlu dukungan dana/fasilitasi untuk membantu penyelenggaraan pendidikan adat Suku Baduy baik dalam pendidikan keluarga, komunitas yang lebih luas, sampai pada tingkat lembaga adat yang lebih tinggi untuk pendidikan adat bagi warga Suku Baduy.
- b. Bagi Suku Laut dukungan dana/fasilitas untuk penyelenggaraan pendidikan, seperti bantuan pompong, tempat singgah untuk belajar, dan dukungan dana untuk pendataan masyarakat laut; penyediaan sarana belajar mengajar; alat transportasi untuk guru/murid; buku bacaan yang sesuai dengan budaya mereka; serta fasilitas lain yang mendukung.
- c. Perlu melakukan sosialisasi tentang fungsi dan pentingnya pendidikan kepada masyarakat dan pimpinan lembaga adat baik Suku Baduy dan Suku Laut.
- d. Pelaksanaan pendidikan perlu melibatkan orang-orang Baduy atau Suku Laut sendiri agar mengetahui permasalahan dan kebutuhan komunitas adat yang bersangkutan sehingga hasilnya lebih berguna untuk kehidupan mereka tanpa meninggalkan adat mereka. Pengembangan kelompok belajar melalui Tutor Sebaya dinilai sangat cocok dengan situasi komunitas adat karena dapat menyesuaikan waktu, tempat, sumber belajar dan strategi lainnya agar tetap memenuhi budaya dan aturan adat masing-masing.
- e. Dana operasional, seperti untuk transportasi, alat tulis dan uang saku sebagaimana bantuan bagi siswa miskin dalam Program Indonesia Pintar (PIP) perlu diberikan kepada warga Baduy maupun Suku Laut yang sedang menempuh pendidikan mendorong anak-anak tetap melanjutkan pendidikannya.
- f. Pelayanan pendidikan bagi komunitas adat perlu memperhatikan kategori dari masyarakat yang bersangkutan. Komunitas Suku Laut misalnya terdapat tiga kategori, yaitu Suku Laut yang nomaden (berpindah-pindah tempat karena hidupnya masih di perahu); komunitas Suku Laut yang sudah dimukimkan tetapi masih relatif homogen; dan Suku Laut yang sudah berbaur dengan masyarakat. Masyarakat Baduy misalnya terdiri

dari Baduy Dalam dan Baduy Luar. Jenis-jenis pendidikan baik formal, nonformal dan informal perlu menyesuaikan kategori masyarakatnya sehingga sesuai dengan kebutuhan komunitas adat yang bersangkutan.

- g. Perlu melihat lagi peraturan yang melandasi pelayanan pendidikan bagi komunitas adat khususnya Permendikbud Nomor 72 Tahun 2013, apakah sudah implementatif atau memadai perlindungannya terhadap nilai-nilai budaya masyarakat adat dalam kaitannya dengan pelayanan pendidikan.
- h. Perlu kerjasama antara pemerintah baik Pusat maupun Daerah dan Lembaga Swadaya Masyarakat serta masyarakat seperti kerjasama pelayanan pendidikan melalui Tutor Sebaya dengan melakukan kerjasama penyediaan fasilitas, bahan ajar dan sarana serta prasarana yang mendukung.

DAFTAR PUSTAKA

- PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS, <http://pelayanan.jakarta.go.id/>, diakses pada tanggal 30 April 2016
- PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, <http://www.unm.ac.id/>, diakses pada tanggal 30 April 2016
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL, <http://www.komnasham.go.id/>, diakses pada tanggal 30 April 2016
- Pemerintah Abaikan Pendidikan Komunitas Adat, <http://www.puailiggoubat.com/berita/2686/>, diakses pada tanggal 30 April 2016
- Koentjaraningrat (ed.), *Masyarakat Terasing di Indonesia*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 1993
- Khidir Marsanto P. *Negara, Adat Melayu, dan Orang Suku Laut di Kepulauan Riau*, <https://iidmarsanto.wordpress.com/2010/12/29/negara-adat-melayu-dan-orang-suku-laut-di-kepulauan-riau/>
- Hamidy, *Masyarakat Terasing, Daerah Riau, di Gerbang, abad XXI*. 1991, Zamrad, Pekanbaru